GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 922 TAHUN 2026

TENTANG

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Pasal 144 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada informasi pembangunan daerah yakni data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dan harus dikelola dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi sesuai surat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 November 2023 Nomor 600.3.4/11781/Bangda Hal Penginputan Modul E-Walidata dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, diperlukan pemanfaatan data statistik sektoral daerah dalam modul e-walidata pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah untuk menjadi data dan informasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, serta penetapan data statistik sektoral daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

c. bahwa untuk melaksanakan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terkait penyebarluasan data statistik sektoral daerah sesuai surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Mei 2026 Nomor 600.3.4/3929/Bangda Hal Surat Pelaksanaan Fasilitasi Ranperkada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 berbasis SIPD, Pemerintah Daerah perlu melakukan publikasi data statistik sektoral daerah tahun 2025;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Data Statistik Sektoral Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan data statistik sektoral daerah tahun 2025 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2026

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 922 TAHUN 2026

TENTANG
DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2025

DAFTAR DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2025

1.01 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
1	1.01.000006	Bahan ajar bahasa daerah kewenangan provinsi yang tersusun	Dokumen	0
2	1.01.000010	Bahasa dan sastra daerah kewenangan provinsi yang terkonservasi	Bahasa	0
3	1.01.000011	Bahasa dan sastra daerah kewenangan provinsi yang terevitalisasi	Bahasa	0
4	1.01.000012	Bahasa dan sastra daerah kewenangan provinsi yang terkaji vitalitasnya	Bahasa	0
5	1.01.000016	Bengkel/unit produksi	Unit	1.013
6	1.01.000017	Bengkel/unit produksi yang layak	Unit	28
7	1.01.000018	Bengkel/unit produksi yang rusak sedang/berat	Unit	1
8	1.01.000085	Modul bahasa daerah kewenangan provinsi yang tersusun	Dokumen	0
9	1.01.000091	Pendidik pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)	Orang	11.455
10	1.01.000092	Pendidik pada satuan pendidikan sekolah menengah yang telah lulus sertifikasi	Orang	24.473
11	1.01.000104	Pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang didistribusikan	Orang	31.578
12	1.01.000118	Pendidik pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berkualifikasi akademik S-1/D-IV	Orang	9.216
13	1.01.000121	Pendidikan khusus yang mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Satuan Pendidikan	82
14	1.01.000134	Peserta didik Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berpotensi putus sekolah	Peserta Didik	0
15	1.01.000135	Peserta didik Sekolah Menengah Atas (SMA) yang menerima biaya personel peserta didik	Peserta Didik	174.030
16	1.01.000160	Rasio pendidik pada pendidikan khusus	Persen	20,9

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
17	1.01.000161	Rasio pendidik pada pendidikan menengah	Persen	5,4
18	1.01.000164	Ruang bina diri	Ruang	172
19	1.01.000165	Ruang bina diri dan bina gerak	Ruang	390
20	1.01.000181	Ruang bina persepsi bunyi dan irama	Ruang	211
21	1.01.000182	Ruang bina pribadi dan sosial	Ruang	86
22	1.01.000207	Ruang kelas sekolah yang perlu direhabilitasi	Ruang	0
23	1.01.000214	Ruang keterampilan	Ruang	1.250
24	1.01.000217	Ruang konseling	Ruang	1.958
25	1.01.000219	Ruang laboratorium bahasa yang layak	Ruang	932
26	1.01.000220	Ruang laboratorium bahasa yang rusak sedang/berat	Ruang	32
27	1.01.000221	Ruang laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang layak	Ruang	2.586
28	1.01.000222	Ruang laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang rusak sedang/berat	Ruang	125
29	1.01.000223	Ruang laboratorium komputer yang layak	Ruang	3.649
30	1.01.000224	Ruang laboratorium komputer yang rusak sedang/berat	Ruang	130
31	1.01.000225	Ruang laboratorium yang layak	Ruang	8.304
32	1.01.000227	Ruang laboratorium bahasa	Ruang	1.229
33	1.01.000230	Ruang laboratorium biologi	Ruang	688
34	1.01.000231	Ruang laboratorium biologi yang layak	Ruang	577
35	1.01.000233	Ruang laboratorium biologi yang rusak sedang/berat	Ruang	6
36	1.01.000235	Ruang laboratorium fisika	Ruang	685
37	1.01.000239	Ruang laboratorium fisika yang layak	Ruang	560
38	1.01.000240	Ruang laboratorium fisika yang rusak sedang/berat	Ruang	6
39	1.01.000244	Ruang laboratorium kimia	Ruang	532
40	1.01.000245	Ruang laboratorium kimia yang layak	Ruang	532
41	1.01.000249	Ruang laboratorium komputer	Ruang	4.689
42	1.01.000255	Ruang Orientasi dan Mobilitas (OM)	Ruang	95
43	1.01.000273	Ruang praktik gambar teknik	Ruang	1
44	1.01.000274	Ruang praktik yang layak	Ruang	591
45	1.01.000278	Ruang Orientasi dan Mobilitas (OM)	Ruang	95
46	1.01.000279	Ruang Orientasi dan Mobilitas (OM) yang layak	Ruang	95
47	1.01.000287	Ruang Tata Usaha (TU)	Ruang	4.638
48	1.01.000290	Ruang Tata Usaha (TU) yang layak	Ruang	3.987

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
49	1.01.000305	Ruang/sudut baca	Ruang	5.946
50	1.01.000377	Satuan pendidikan yang belum memiliki sarana mobilitas sekolah	Satuan Pendidikan	0
51	1.01.000381	Satuan pendidikan yang membutuhkan sarana mobilitas sekolah	Satuan Pendidikan	18
52	1.01.000382	Satuan pendidikan yang membutuhkan alat praktik dan peraga peserta didik	Satuan Pendidikan	326
53	1.01.000385	Satuan pendidikan yang memiliki sarana mobilitas sekolah	Satuan Pendidikan	18
54	1.01.000397	Satuan pendidikan yang sudah memiliki alat praktik dan peraga peserta didik	Satuan Pendidikan	326
55	1.01.000406	Sekolah Menengah Atas (SMA) yang mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Satuan Pendidikan	402
56	1.01.000407	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Satuan Pendidikan	544
57	1.01.000435	Tempat beribadah	Ruang	5.197
58	1.01.000436	Tempat bermain/berolahraga	Unit	3.710
59	1.01.000442	Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah yang telah lulus sertifikasi	Orang	165
60	1.01.000454	Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)	Orang	3.776
61	1.01.000455	Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berkualifikasi akademik S-1/ D-IV	Orang	1.188
62	1.01.000471	Unit pendidikan khusus	Unit	87
63	1.01.000472	Unit pendidikan khusus yang layak	Kasus	87
64	1.01.000477	Unit Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Unit	559
65	1.01.000478	Unit Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang layak	Unit	559
66	1.01.000589	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar (SD) rusak total	Unit	0
67	1.01.000689	Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri	Unit	119
68	1.01.000690	Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) swasta	Unit	398
69	1.01.000691	Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA)	Unit	517
70	1.01.000692	Jumlah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri	Orang	12.746
71	1.01.000693	Jumlah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) swasta	Orang	21.138

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
72	1.01.000694	Jumlah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)	Orang	186.258
73	1.01.000695	Jumlah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) laki-laki negeri	Orang	39.214
74	1.01.000696	Jumlah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) laki-laki swasta	Orang	49.929
75	1.01.000697	Jumlah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) laki-laki	Orang	89.143
76	1.01.000698	Jumlah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) perempuan negeri	Orang	49.471
77	1.01.000699	Jumlah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) perempuan swasta	Orang	47.644
78	1.01.000700	Jumlah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) perempuan	Orang	97.115
79	1.01.000701	Jumlah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) tingkat 10 negeri	Orang	29.775
80	1.01.000702	Jumlah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) tingkat 10 swasta	Orang	31.699
81	1.01.000703	Jumlah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) tingkat 1	Orang	61.474
82	1.01.000704	Jumlah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) tingkat 11 negeri	Orang	29.833
83	1.01.000705	Jumlah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) tingkat 11 swasta	Orang	32.688
84	1.01.000706	Jumlah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) tingkat 2	Orang	62.521
85	1.01.000707	Jumlah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) tingkat 12 negeri	Orang	29.077
86	1.01.000708	Jumlah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) tingkat 12 swasta	Orang	33.186
87	1.01.000709	Jumlah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) tingkat 3	Orang	62.263
88	1.01.000710	Jumlah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) tingkat negeri	Orang	88.685
89	1.01.000711	Jumlah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) tingkat swasta	Orang	97.573
90	1.01.000712	Jumlah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) tingkat	Orang	186.258
91	1.01.000713	Jumlah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) tingkat negeri	Orang	88.685
92	1.01.000714	Jumlah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) tingkat swasta	Orang	97.573
93	1.01.000715	Jumlah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) tingkat	Orang	186.258
94	1.01.000716	Jumlah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) tingkat negeri	Orang	88.685

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
95	1.01.000717	Jumlah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) tingkat swasta	Orang	97.573
96	1.01.000725	Jumlah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) usia di atas 12 tahun negeri	Orang	88.685
97	1.01.000726	Jumlah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) usia di atas 12 tahun swasta	Orang	97.568
98	1.01.000727	Jumlah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) usia di atas 12 tahun	Orang	186.253
99	1.01.000734	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) dan guru negeri	Orang	4.589
100	1.01.000735	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) dan guru swasta	Orang	7.331
101	1.01.000736	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) dan guru	Orang	11.920
102	1.01.000737	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) dan guru laki-laki negeri	Orang	1.769
103	1.01.000738	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) dan guru laki-laki swasta	Orang	3.191
104	1.01.000739	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) dan guru laki-laki	Orang	4.960
105	1.01.000740	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) dan guru perempuan negeri	Orang	2.820
106	1.01.000741	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) dan guru perempuan swasta	Orang	4.140
107	1.01.000742	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) dan guru perempuan	Orang	6.960
108	1.01.000743	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) dan guru ijazah di bawah S-1 negeri	Orang	126
109	1.01.000744	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) dan guru ijazah di bawah S-1 swasta	Orang	632
110	1.01.000745	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) dan guru ijazah di bawah S-1	Orang	758
111	1.01.000746	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) dan guru ijazah S-1 ke atas negeri	Orang	4.463
112	1.01.000747	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) dan guru ijazah S-1 ke atas swasta	Orang	6.699
113	1.01.000748	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) dan guru ijazah S-1 ke atas	Orang	11.162
114	1.01.000749	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) laki-laki negeri	Orang	1.138
115	1.01.000750	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) laki-laki swasta	Orang	1.293
116	1.01.000751	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) laki-laki	Orang	2.431

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
117	1.01.000752	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) perempuan negeri	Orang	426
118	1.01.000753	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) perempuan swasta	Orang	919
119	1.01.000754	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) perempuan	Orang	1.345
120	1.01.000755	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) ijazah SMA negeri	Orang	266
121	1.01.000756	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) ijazah SMA swasta	Orang	500
122	1.01.000757	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) ijazah SMA	Orang	766
123	1.01.000758	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) ijazah di atas SMA negeri	Orang	654
124	1.01.000759	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) ijazah di atas SMA swasta	Orang	1.073
125	1.01.000760	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) ijazah di atas SMA	Orang	1.727
126	1.01.000761	Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri	Orang	2.506
127	1.01.000762	Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Atas (SMA) swasta	Orang	3.326
128	1.01.000763	Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Atas (SMA)	Orang	5.832
129	1.01.000764	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri	Unit	3.274
130	1.01.000765	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas (SMA) swasta	Unit	5.798
131	1.01.000766	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas (SMA)	Unit	9.072
132	1.01.000767	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas (SMA) baik negeri	Unit	2.364
133	1.01.000768	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas (SMA) baik swasta	Unit	4.220
134	1.01.000769	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas (SMA) baik	Unit	6.584
135	1.01.000770	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas (SMA) rusak ringan negeri	Unit	208
136	1.01.000771	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas (SMA) rusak ringan swasta	Unit	333
137	1.01.000772	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas (SMA) rusak ringan	Unit	541
138	1.01.000773	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas (SMA) rusak sedang negeri	Unit	10

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
162	1.01.000798	Jumlah siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tingkat 10 swasta	Orang	47.278
163	1.01.000800	Jumlah siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tingkat 11 negeri	Orang	19.593
164	1.01.000801	Jumlah siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tingkat 11 swasta	Orang	43.147
165	1.01.000803	Jumlah siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tingkat 12 negeri	Orang	18.736
166	1.01.000804	Jumlah siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tingkat 12 swasta	Orang	44.855
167	1.01.000806	Jumlah siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tingkat 13 negeri	Orang	695
168	1.01.000807	Jumlah siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tingkat 13 swasta	Orang	35
169	1.01.000809	Jumlah siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tingkat negeri	Orang	58.475
170	1.01.000810	Jumlah siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tingkat swasta	Orang	135.315
171	1.01.000812	Jumlah siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tingkat negeri	Orang	58.475
172	1.01.000813	Jumlah siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tingkat swasta	Orang	135.315
173	1.01.000814	Jumlah siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tingkat	Orang	193.790
174	1.01.000821	Jumlah siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) usia di atas 12 tahun negeri	Orang	58.474
175	1.01.000822	Jumlah siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) usia di atas 12 tahun swasta	Orang	135.315
176	1.01.000823	Jumlah siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) usia di atas 12 tahun	Orang	193.789
177	1.01.000830	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan guru negeri	Orang	3.273
178	1.01.000831	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan guru swasta	Orang	8.251
179	1.01.000833	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan guru laki-laki negeri	Orang	1.412
180	1.01.000834	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan guru laki-laki swasta	Orang	3.832
181	1.01.000835	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan guru laki-laki	Orang	5.244
182	1.01.000836	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan guru perempuan negeri	Orang	1.861

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
183	1.01.000837	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan guru perempuan swasta	Orang	4.419
184	1.01.000838	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan guru perempuan	Orang	6.280
185	1.01.000839	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan guru ijazah di bawah S-1 negeri	Orang	95
186	1.01.000840	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan guru ijazah di bawah S-1 swasta	Orang	779
187	1.01.000841	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan guru ijazah di bawah S-1	Orang	874
188	1.01.000842	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan guru ijazah S-1 ke atas negeri	Orang	3.178
189	1.01.000843	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan guru ijazah S-1 ke atas swasta	Orang	7.472
190	1.01.000844	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan guru ijazah S-1 ke atas	Orang	10.650
191	1.01.000845	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) laki-laki negeri	Orang	767
192	1.01.000846	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) laki-laki swasta	Orang	1.596
193	1.01.000847	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) laki-laki	Orang	2.363
194	1.01.000848	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) perempuan negeri	Orang	336
195	1.01.000849	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) perempuan swasta	Orang	974
196	1.01.000850	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) perempuan	Orang	1.310
197	1.01.000851	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ijazah SMA negeri	Orang	245
198	1.01.000852	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ijazah SMA swasta	Orang	658
199	1.01.000853	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ijazah SMA	Orang	903

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
200	1.01.000854	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ijazah di atas SMA negeri	Orang	397
201	1.01.000855	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ijazah di atas SMA swasta	Orang	880
202	1.01.000856	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ijazah di atas SMA	Orang	1.277
203	1.01.000857	Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri	Orang	1.679
204	1.01.000858	Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta	Orang	5.002
205	1.01.000859	Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Orang	6.681
206	1.01.000860	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri	Unit	3.423
207	1.01.000861	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta	Unit	9.762
208	1.01.000862	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Unit	13.185
209	1.01.000863	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik negeri	Unit	1.513
210	1.01.000864	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik swasta	Unit	5.669
211	1.01.000865	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik	Unit	7.182
212	1.01.000866	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) rusak ringan negeri	Unit	190
213	1.01.000867	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) rusak ringan swasta	Unit	880
214	1.01.000868	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) rusak ringan	Unit	1.070
215	1.01.000869	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) rusak sedang negeri	Unit	2
216	1.01.000870	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) rusak sedang swasta	Unit	128
217	1.01.000871	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) rusak sedang	Unit	130
218	1.01.000872	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) rusak berat negeri	Unit	23
219	1.01.000873	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) rusak berat swasta	Unit	75
220	1.01.000874	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) rusak berat	Unit	98

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
221	1.01.000875	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) rusak total negeri	Unit	0
222	1.01.000876	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) rusak total swasta	Unit	0
223	1.01.000877	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) rusak total	Unit	0
224	1.01.000878	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ijazah S-1 negeri	Orang	333
225	1.01.000879	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ijazah S-1 swasta	Orang	747
226	1.01.000880	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ijazah S-1	Orang	1.080
227	1.01.000883	Komunitas belajar pendidik dan tenaga kependidikan	Komunitas	1
228	1.01.000888	Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Paket	1.798
229	1.01.000889	Layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	183
230	1.01.000890	Akademi komunitas	Unit	89

1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
1	1.02.000001	Alat uji dan kalibrasi pada *Regional Maintenance Center* (RMC)	Unit	0
2	1.02.000005	Alat kesehatan (alkes)/alat penunjang medis fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	Unit	12.231
3	1.02.000007	Alat kesehatan (alkes)/alat penunjang medis fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)*existing*	Unit	47.461
4	1.02.000013	Bahan habis pakai lainnya	Paket	1
5	1.02.000017	Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang didistribusikan ke kabupaten/kota	Paket	1
6	1.02.000019	Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Sarana	60
7	1.02.000022	Dokter Gigi	Orang	484
8	1.02.000023	Dokter Spesialis Anak	Orang	89
9	1.02.000024	Dokter Spesialis Anestesi	Orang	84
10	1.02.000025	Dokter Spesialis Bedah	Orang	66
11	1.02.000026	Dokter Spesialis Jantung	Orang	29
12	1.02.000027	Dokter Spesialis Kebidanan	Orang	89
13	1.02.000028	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Orang	34

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
14	1.02.000029	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Orang	22
15	1.02.000030	Dokter Spesialis Mata	Orang	50
16	1.02.000031	Dokter Spesialis Paru	Orang	48
17	1.02.000032	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Orang	102
18	1.02.000033	Dokter Spesialis Radiologi	Orang	47
19	1.02.000034	Dokter Spesialis Telinga, Hidung, Tenggorokan (THT)	Orang	37
20	1.02.000035	Dokter Spesialis Urologi	Orang	14
21	1.02.000036	Dokter Umum	Orang	1.647
22	1.02.000041	Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan khusus	Dokumen	4
23	1.02.000042	Dokumen hasil investigasi lanjutan kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal oleh kabupaten/kota	Dokumen	359
24	1.02.000046	Dokumen hasil pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan	Dokumen	7
25	1.02.000048	Dokumen hasil pembinaan pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan	Dokumen	1
26	1.02.000049	Dokumen hasil pengelolaan data dan informasi kesehatan	Dokumen	4
27	1.02.000050	Dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Dokumen	4
28	1.02.000051	Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dokumen	4
29	1.02.000052	Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Dokumen	1
30	1.02.000053	Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Dokumen	4
31	1.02.000054	Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan haji	Dokumen	1
32	1.02.000056	Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	Dokumen	4
33	1.02.000057	Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Dokumen	4
34	1.02.000058	Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen	4

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
35	1.02.000059	Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupunktur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya	Dokumen	3
36	1.02.000061	Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan usia produktif	Dokumen	4
37	1.02.000062	Dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Dokumen	4
38	1.02.000063	Dokumen hasil pengelolaan penelitian kesehatan	Dokumen	782
39	1.02.000065	Dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	Dokumen	2
40	1.02.000067	Dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga	Dokumen	38
41	1.02.000068	Dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko Alat kesehatan (alkes), optikal, dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	1.340
42	1.02.000079	Fasilitas kesehatan (faskes) yang terakreditasi di kabupaten/kota	Unit	82
43	1.02.000084	Fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang belum dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Unit	0
44	1.02.000086	Fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang telah dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Unit	76
45	1.02.000088	Fasilitas kesehatan (faskes) lainnya	Unit	3.897
46	1.02.000089	Fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang melayani konsultasi jarak jauh antar-fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) *existing*	Unit	0
47	1.02.000090	Fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang melayani melalui telemedisin	Unit	0
48	1.02.000091	Gudang umum	Unit	117
49	1.02.000093	Hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Dokumen	4
50	1.02.000098	*High Care Unit* (HCU)	Unit	71
51	1.02.000099	Ibu bersalin	Orang	192.693
52	1.02.000100	Ibu hamil	Orang	197.024

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
53	1.02.000101	*Intensive Cardiac Care Unit* (ICCU)/*Intensive Cardiovascular Care Unit* (ICVCU)	Unit	48
54	1.02.000102	*Intensive Care Unit* (ICU)	Unit	312
55	1.02.000103	Jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Unit	6.725
56	1.02.000104	Kamar mandi/toilet (*Water Closet* (WC)) (perempuan dan laki-laki terpisah)	Unit	3.310
57	1.02.000106	Kegiatan hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, dan peran serta masyarakat	Dokumen	4
58	1.02.000107	Kegiatan hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	3
59	1.02.000110	Keluarga yang mendapatkan pelayanan dasar melalui pendekatan keluarga	Keluarga	2.190.957
60	1.02.000111	Laporan hasil investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pascaimunisasi dan pemberian obat massal)	Laporan	359
61	1.02.000112	Layanan kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK)	Layanan	0
62	1.02.000113	*Neonatal Intensive Care Unit* (NICU)	Unit	127
63	1.02.000114	Obat dan vaksin yang disediakan	Paket	369
64	1.02.000115	Obat, vaksin, makanan dan minuman, serta fasilitas kesehatan (faskes) lainnya yang disediakan	Paket	1
65	1.02.000116	Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Orang	45.385
66	1.02.000118	Orang terduga menderita *Human Immunodeficiency Virus* (HIV)	Orang	451.783
67	1.02.000119	Orang terduga menderita Tuberkulosis (TB) yang mendapatkan pelayanan	Orang	386.221
68	1.02.000120	Orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Orang	19.763
69	1.02.000121	Orang yang menerima layanan deteksi dini penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA)	Orang	557
70	1.02.000123	Paket spesimen penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB)	Paket	2
71	1.02.000140	Pengolahan limbah	Unit	131
72	1.02.000141	Penyalahguna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA)	Orang	605
73	1.02.000143	Peralatan di penatu	Unit	793

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
74	1.02.000144	Peralatan di ruang *Central Sterile Supply Department* (CSSD)	Unit	1.200
75	1.02.000145	Peralatan di ruang dapur/gizi	Unit	1.236
76	1.02.000146	Peralatan di ruang farmasi	Unit	986
77	1.02.000147	Peralatan di ruang gawat darurat	Unit	5.924
78	1.02.000148	Peralatan di ruang intensif	Unit	5.425
79	1.02.000149	Peralatan di ruang kantor dan administrasi	Unit	13.805
80	1.02.000150	Peralatan di ruang laboratorium	Unit	4.538
81	1.02.000151	Peralatan di ruang operasi	Unit	1.900
82	1.02.000152	Peralatan di ruang radiologi	Unit	302
83	1.02.000153	Peralatan di ruang rawat inap (tempat tidur, dan lain-lain)	Unit	7.138
84	1.02.000154	Peralatan di ruang rekam medis	Unit	1.967
85	1.02.000155	Peralatan penanggulangan kebakaran	Unit	4.720
86	1.02.000156	Peralatan pengelolaan air bersih, limbah, dan sanitasi	Unit	282
87	1.02.000158	*Pediatric Intensive Care Unit* (PICU)	Unit	86
88	1.02.000159	Prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	Unit	4.092
89	1.02.000160	Prasarana fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	Unit	4.092
90	1.02.000162	*Public Safety Center* (PSC) 119	Unit	1
91	1.02.000164	Puskesmas	Unit	44
92	1.02.000165	*Respiratory Intensive Care Unit* (RICU)	Unit	0
93	1.02.000166	Ruang administrasi	Unit	241
94	1.02.000167	Ruang administrasi dan manajemen	Unit	259
95	1.02.000168	Ruang Air Susu Ibu (ASI)	Unit	173
96	1.02.000169	Ruang bank darah rumah sakit	Unit	10
97	1.02.000170	Ruang cuci linen	Unit	72
98	1.02.000171	Ruang dinas tenaga kesehatan (nakes)	Unit	259
99	1.02.000172	Ruang farmasi	Unit	220
100	1.02.000173	Ruang gawat darurat	Unit	31
101	1.02.000174	Ruang gizi	Unit	44
102	1.02.000175	Ruang jaga petugas	Unit	212
103	1.02.000176	Ruang jenazah	Unit	54
104	1.02.000177	Ruang kantor untuk karyawan	Unit	242
105	1.02.000178	Ruang Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Unit	111
106	1.02.000179	Ruang kesehatan anak dan imunisasi	Unit	43
107	1.02.000180	Ruang kesehatan gigi dan mulut	Unit	44

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
108	1.02.000181	Ruang kesehatan ibu dan Keluarga Berencana (KB)	Unit	43
109	1.02.000182	Ruang Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	Unit	44
110	1.02.000183	Ruang laboratorium	Unit	44
111	1.02.000184	Ruang penatu	Unit	73
112	1.02.000185	Ruang operasi	Unit	60
113	1.02.000186	Ruang parkir	Unit	171
114	1.02.000187	Ruang pemeliharaan sarana dan prasarana (sarpras)	Unit	53
115	1.02.000188	Ruang pemeriksaan khusus	Unit	154
116	1.02.000189	Ruang pemeriksaan umum	Unit	202
117	1.02.000190	Ruang penanggulangan kebakaran	Unit	28
118	1.02.000191	Ruang pendaftaran dan rekam medis	Unit	200
119	1.02.000192	Ruang pengelolaan gas medis	Unit	56
120	1.02.000193	Ruang pengolahan air bersih, limbah, dan sanitasi	Unit	116
121	1.02.000194	Ruang penyelenggaraan makanan (dapur/pantri)	Unit	107
122	1.02.000195	Ruang persalinan	Unit	87
123	1.02.000196	Ruang radiologi	Unit	30
124	1.02.000197	Ruang rapat/diskusi	Unit	244
125	1.02.000198	Ruang rawat inap	Unit	594
126	1.02.000199	Ruang rawat intensif	Unit	108
127	1.02.000200	Ruang rawat jalan	Unit	1.060
128	1.02.000201	Ruang rawat pascapersalinan	Unit	97
129	1.02.000202	Ruang rehabilitasi medis	Unit	34
130	1.02.000203	Ruang rekam medis	Unit	129
131	1.02.000204	Ruang sterilisasi	Unit	106
132	1.02.000205	Ruang tindakan dan gawat darurat	Unit	129
133	1.02.000206	Ruang tunggu	Unit	548
134	1.02.000207	Rumah dinas tenaga kesehatan (nakes)	Unit	46
135	1.02.000208	Rumah sakit	Unit	2
136	1.02.000209	Rumah sakit kelas B	Unit	5
137	1.02.000210	Rumah sakit kelas B yang memiliki izin operasional	Unit	61
138	1.02.000214	Rumah sakit kelas C	Unit	7
139	1.02.000215	Rumah sakit kelas C dan D	Unit	115
140	1.02.000216	Rumah sakit kelas C dan D yang memiliki izin operasional	Unit	115

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
141	1.02.000219	Rumah sakit kelas C dan D yang belum memiliki/habis masa izin operasional	Unit	0
142	1.02.000220	Rumah sakit kelas D	Unit	17
143	1.02.000221	Sarana di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	Unit	1.588
144	1.02.000222	Sarana fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	Unit	1.588
145	1.02.000223	Sarana fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) *existing*	Unit	1.588
146	1.02.000225	Spesimen penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke laboratorium rujukan/nasional yang didistribusikan	Paket	37
147	1.02.000227	Telemedisin	Unit	0
148	1.02.000228	Tempat tidur rumah sakit	Unit	4.620
149	1.02.000229	Tenaga apotek	Orang	1.651
150	1.02.000230	Tenaga gizi	Orang	517
151	1.02.000231	Tenaga kebidanan	Orang	2.472
152	1.02.000232	Tenaga kebidanan yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	1.380
153	1.02.000233	Tenaga keperawatan	Orang	7.976
154	1.02.000234	Tenaga keperawatan yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	5.570
155	1.02.000235	Tenaga kesehatan (nakes) lainnya	Orang	4.007
156	1.02.000236	Tenaga kesehatan (nakes) lainnya yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	6.822
157	1.02.000237	Tenaga kesehatan (nakes) lingkungan	Orang	398
158	1.02.000238	Tenaga kesehatan (nakes) masyarakat	Orang	428
159	1.02.000239	Tenaga kesehatan (nakes) tradisional	Orang	441
160	1.02.000240	Tenaga keteknisan medis	Orang	860
161	1.02.000241	Tenaga keterapian fisik	Orang	149
162	1.02.000242	Tenaga teknik biomedika	Orang	1.230
163	1.02.000243	Unit pemeliharaan Fasilitas Kesehatan (Faskes) *Regional Maintenance Center* (RMC)	Unit	3
164	1.02.000257	Parkir kendaraan roda 2 dan 4 serta garasi untuk ambulans dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) keliling	Unit	431
165	1.02.000258	Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang	Sarana	61
166	1.02.000260	Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang yang memiliki izin	Sarana	61
167	1.02.000261	Pelayanan kesehatan berbasis telemedisin	Layanan	0
168	1.02.000263	Penderita *diabetes melitus*	Orang	311.453

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
169	1.02.000264	Penderita hipertensi	Orang	935.792
170	1.02.000265	Penduduk mendapatkan jaminan kesehatan masyarakat	Dokumen	1
171	1.02.000266	Penduduk mendapatkan pelayanan kesehatan tradisional, akupunktur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya	Orang	4.468
172	1.02.000267	Penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Orang	3.274
173	1.02.000268	Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Orang	15.000
174	1.02.000269	Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Orang	15.000
175	1.02.000270	Penduduk usia lanjut	Orang	1.059.594
176	1.02.000271	Penduduk usia produktif	Orang	8.012.466
177	1.02.000273	Pengolahan limbah	Unit	131
178	1.02.000275	Alat kesehatan	Unit	12.231
179	1.02.000276	Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)	Unit	1
180	1.02.000278	Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit campak yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Dokumen	1
181	1.02.000282	Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit kusta yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Dokumen	2
182	1.02.000285	Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit kecacingan yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Dokumen	2
183	1.02.000289	Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit filariasis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Dokumen	2
184	1.02.000290	Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit frambusia yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Dokumen	1
185	1.02.000291	Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Dokumen	2
186	1.02.000293	Dokumen kebijakan/regulasi yang disusun	Dokumen	581
187	1.02.000304	Balai pelatihan kesehatan sesuai standar mutu	Unit	1
188	1.02.000305	Dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	Dokumen	4
189	1.02.000306	Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan	Orang	11.004.063

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
190	1.02.000309	Hasil pemberdayaan tenaga kesehatan (nakes) termasuk tenaga kesehatan (nakes) yang ditempatkan atau ditugaskan pemerintah pusat di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) sesuai standar	Orang	658
191	1.02.000311	Fasilitas kesehatan (faskes) yang melakukan pelaporan insiden keselamatan pasien	Unit	76
192	1.02.000314	Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome* (HIV/AIDS) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Dokumen	2
193	1.02.000315	Dokumen hasil penanggulangan penyakit Tuberkulosis (TB) sesuai standar	Dokumen	1
194	1.02.000316	Dokumen hasil penanggulangan penyakit malaria sesuai standar	Dokumen	1

1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
1	1.03.000020	Bangunan Gedung Negara (BGN) untuk kepentingan strategis provinsi	Bangunan Gedung Negara	0
2	1.03.000022	Bangunan gedung untuk kepentingan strategis provinsi	Bangunan Gedung	2
3	1.03.000027	Bantuan teknis pembangunan Bangunan Gedung Negara (BGN) untuk kepentingan strategis provinsi	Bantuan Teknis	2
4	1.03.000066	Dokumen evaluasi pemanfaatan Sumber Daya Air (SDA) Wilayah Sungai (WS) kewenangan provinsi	Dokumen	0
5	1.03.000069	Dokumen hasil survei kondisi jalan	Dokumen	1
6	1.03.000070	Dokumen hasil survei kondisi jembatan	Dokumen	1
7	1.03.000071	Dokumen kebijakan dan strategi daerah air minum	Dokumen	1
8	1.03.000074	Dokumen kebijakan Peraturan Daerah (Perda)/Peraturan Gubernur (Pergub) selain Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi	Dokumen	1
9	1.03.000076	Dokumen kebijakan strategis daerah jalan	Dokumen	0
10	1.03.000083	Dokumen leger jalan	Dokumen	5
11	1.03.000085	Dokumen lingkungan hidup bangunan gedung untuk kepentingan strategis provinsi	Dokumen	6

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
12	1.03.000086	Dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi air tanah dan air baku	Dokumen	1
13	1.03.000087	Dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan, danau, dan bangunan penampung air lainnya	Dokumen	0
14	1.03.000089	Dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengendali banjir, lahar, dan pengaman pantai yang disusun	Dokumen	59
15	1.03.000107	Dokumen pelaporan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) air minum	Dokumen	4
16	1.03.000132	Dokumen penghitungan kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) air limbah	Dokumen	4
17	1.03.000134	Dokumen pengumpulan data Standar Pelayanan Minimal (SPM) air limbah	Dokumen	4
18	1.03.000135	Dokumen pengumpulan data Standar Pelayanan Minimal (SPM) air minum	Dokumen	4
19	1.03.000150	Dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan	Dokumen	0
20	1.03.000154	Dokumen rencana induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	1
21	1.03.000157	Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)	Dokumen	1
22	1.03.000158	Dokumen rencana pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) air limbah	Dokumen	4
23	1.03.000159	Dokumen rencana pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) air minum	Dokumen	4
24	1.03.000162	Dokumen rencana teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan	Dokumen	3
25	1.03.000163	Dokumen rencana teknis untuk konstruksi air tanah dan air baku	Dokumen	1
26	1.03.000166	Dokumen rencana teknis untuk konstruksi pengendali banjir, lahar, dan pengaman pantai	Dokumen	59
27	1.03.000192	Jembatan layang *(flyover)*	*Flyover*	0
28	1.03.000196	Jembatan	Jembatan	0
29	1.03.000212	Kapasitas unit produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Liter per detik	22.988,3
30	1.03.000247	Panjang pemecah gelombang	Kilometer	0,9
31	1.03.000249	Panjang jalan	Kilometer	0,57
32	1.03.000252	Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang	Sarana	61
33	1.03.000254	Penduduk terdampak dan berisiko pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Orang	3.274

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
34	1.03.000255	Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Orang	15.000
35	1.03.000315	Sarana pendukung sistem drainase perkotaan	Unit	172
36	1.03.000336	Stasiun pompa banjir	Unit	1
37	1.03.000357	Terowongan/*tunnel*	Terowongan /*Tunnel*	0
38	1.03.000364	*Underpass*	*Underpass*	0
39	1.03.000385	Jumlah asesor pelatihan tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	Orang	60
40	1.03.000404	Jumlah Bangunan Gedung Negara (BGN)	Bangunan Gedung Negara	0
41	1.03.000413	Jumlah bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi yang diubahsuaikan	Bangunan Gedung	0
42	1.03.000442	Jumlah dokumen kajian kelayakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) regional	Dokumen	0
43	1.03.000445	Jumlah dokumen pelaksanaan pembangunan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Dokumen	2
44	1.03.000446	Jumlah dokumen Pelaporan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) air limbah	Dokumen	4
45	1.03.000450	Jumlah dokumen pemanfaatan pembangunan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Dokumen	6
46	1.03.000451	Jumlah dokumen pembinaan	Dokumen	165
47	1.03.000453	Jumlah dokumen pembongkaran pembangunan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Dokumen	0
48	1.03.000454	Jumlah dokumen pengawasan	Dokumen	0
49	1.03.000456	Jumlah dokumen pengawasan pembangunan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Dokumen	6
50	1.03.000458	Jumlah dokumen penghitungan kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) air limbah	Dokumen	4
51	1.03.000459	Jumlah dokumen pengumpulan data Standar Pelayanan Minimal (SPM) air limbah	Dokumen	4
52	1.03.000461	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Dokumen	6

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
53	1.03.000469	Jumlah dokumen prosedur operasi standar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen	1
54	1.03.000474	Jumlah dokumen kriteria kesiapan untuk konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas kabupaten/kota	Dokumen	1
55	1.03.000475	Jumlah dokumen rencana induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	1
56	1.03.000477	Jumlah dokumen rencana pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) air limbah	Dokumen	4
57	1.03.000478	Jumlah dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)	Dokumen	0
58	1.03.000479	Jumlah dokumen rencana pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dokumen	1
59	1.03.000483	Jumlah dokumen Rencana Teknis Rinci (RTR) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	1
60	1.03.000485	Jumlah dokumen *roadmap* sanitasi provinsi	Dokumen	0
61	1.03.000489	Jumlah dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK)	Dokumen	0
62	1.03.000491	Jumlah dokumen studi kelayakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen	0
63	1.03.000496	Jumlah instruktur pelatihan tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	Orang	0
64	1.03.000502	Jumlah kajian naskah akademis penyusunan regulasi air limbah domestik	Dokumen	1
65	1.03.000505	Jumlah laporan pengembangan dan pengelolaan sistem data dan informasi air minum	Dokumen	1
66	1.03.000529	Jumlah penyelenggara pelatihan tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	Orang	3
67	1.03.000538	Jumlah Rencana Teknis Rinci (RTR) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen	1
68	1.03.000569	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	Orang	0
69	1.03.000579	Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) terpusat	Meter Kubik per Hari	21.378
70	1.03.000602	Panjang bangunan pengaman pantai	Kilometer	0
71	1.03.000604	Panjang jalan kewenangan provinsi	Kilometer	0,57
72	1.03.000610	Dokumen pengumpulan data Standar Pelayanan Minimal (SPM) air limbah	Dokumen	4

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
73	1.03.000614	Jumlah dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	1
74	1.03.000623	Jumlah dokumen rencana pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dokumen	1
75	1.03.000624	Jumlah jaringan perpipaan sambungan rumah	Sambungan Rumah (SR)	19.951
76	1.03.000639	Jumlah pembangunan embung	Unit	15
77	1.03.000641	Jumlah pembangunan penampung air	Unit	0
78	1.03.000652	Jumlah pembangunan pintu air	Unit	32
79	1.03.000653	Jumlah pembangunan bendungan pengendali banjir	Unit	0
80	1.03.000657	Jumlah pembangunan polder	Unit	0
81	1.03.000658	Jumlah pembangunan kolam retensi	Unit	15
82	1.03.000664	Panjang pembangunan *seawall*	Kilometer	0,4
83	1.03.000672	Jumlah peningkatan stasiun pompa banjir	Unit	3
84	1.03.000679	Peningkatan *Flood Forecasting and Warning System* (FFWS)	Unit	1
85	1.03.000683	Panjang normalisasi/restorasi sungai	Kilometer	1,48
86	1.03.000686	Operasi dan pemeliharaan embung	Unit	11
87	1.03.000696	Operasi dan pemeliharaan stasiun pompa banjir	Unit	152
88	1.03.000701	Operasi dan pemeliharaan panjang pemecah gelombang	Kilometer	0,5
89	1.03.000702	Operasi dan pemeliharaan panjang *seawall*	Kilometer	0,5
90	1.03.000703	Operasi dan pemeliharaan panjang bangunan pengaman pantai	Kilometer	0,5
91	1.03.000733	Pembangunan panjang drainase perkotaan	Kilometer	193
92	1.03.000735	Operasi dan pemeliharaan jumlah sistem drainase perkotaan	Sistem Drainase Perkotaan	550
93	1.03.000737	Jumlah pembangunan bendung pengendali banjir	Unit	0
94	1.03.000745	Dokumen studi kelayakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen	0
95	1.03.000746	Jumlah Rencana Teknis Rinci (RTR)/*Detail Engineering Design* (DED) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen	1
96	1.03.000747	Jumlah dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen	1

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
97	1.03.000748	Jumlah laporan pengembangan dan pengelolaan sistem data dan informasi air minum	Dokumen	1
98	1.03.000749	Kapasitas unit produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas kabupaten/kota	Liter per detik	12,75
99	1.03.910117	Sambungan rumah penyediaan air minum	Sambungan Rumah (SR)	19.951
100	1.03.910123	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	599
101	1.03.910126	Jumlah prasarana dan sarana pendukung Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)-terpusat	Paket	2
102	1.03.910129	Jumlah dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota	Dokumen	3
103	1.03.910143	Dokumen pemantauan dan evaluasi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota	Dokumen	5
104	1.03.910147	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Sistem Informasi	4
105	1.03.910182	Jumlah penyelenggara bangunan gedung dan masyarakat	Orang	120
106	1.03.910209	Jumlah bangunan gedung hijau	Bangunan Gedung	23
107	1.03.910210	Jumlah dokumen pelestarian pembangunan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Dokumen	6
108	1.03.910211	Jumlah Bangunan Gedung Negara (BGN) yang ditangani	Unit	0
109	1.03.910212	Luas Bangunan Gedung Negara (BGN) yang ditangani	Meter Persegi	0
110	1.03.910213	Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) setempat	Dokumen	1
111	1.03.910214	Rekomendasi pendanaan pembangunan Bangunan Gedung Negara (BGN) yang dikeluarkan oleh dinas teknis provinsi	Dokumen	7
112	1.03.910215	Ketersediaan pengelola teknis yaitu tenaga teknis perangkat daerah yang tersertifikasi yang bertanggung jawab dalam pembinaan Bangunan Gedung Negara (BGN) untuk membantu perangkat daerah dalam pembangunan Bangunan Gedung Negara (BGN)	Orang	0

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
113	1.03.910216	Dokumen kajian *Feasibility Study* (FS) dan dokumen lingkungan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)/Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)/Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)	Dokumen	6
114	1.03.910217	Kesesuaian dengan dokumen tata ruang: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)/Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Keterangan Rencana Kota (KRK)/Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	Dokumen	1
115	1.03.910218	Surat keterangan status Cagar Budaya (CB) provinsi yang ditetapkan oleh gubernur dan surat keterangan kepemilikan objek Cagar Budaya (CB) yang dikuasai negara/pemerintah	Dokumen	0
116	1.03.910219	Rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi	Dokumen	0
117	1.03.910254	Sambungan rumah/subsistem pelayanan air limbah domestik	Sambungan Rumah (SR)	156

1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
1	1.04.000023	Data pembentukan tim satuan tugas (satgas), tim pendamping, dan fasilitator	Dokumen	1
2	1.04.000025	Data sebaran dan titik koordinat lokasi rawan bencana provinsi	Dokumen	1
3	1.04.000082	Laporan pelaksanaan operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program	Laporan	1
4	1.04.000097	Laporan pelaksanaan proses pembangunan rumah khusus beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) bagi korban relokasi program	Laporan	1
5	1.04.000109	Laporan proses penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) permukiman	Laporan	1
6	1.04.000112	Lokasi permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) yang menunjang fungsi permukiman	Lokasi	3
7	1.04.000152	Rencana penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) permukiman	Dokumen	6
8	1.04.000163	Rumah khusus beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) bagi yang terkena relokasi program provinsi yang terbangun	Unit Rumah	0

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
9	1.04.000180	Rumah pada lokasi relokasi program provinsi yang dilaksanakan operasional dan pemeliharaan	Unit Rumah	11.102
10	1.04.000192	Rumah yang menerima manfaat penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) permukiman	Unit Rumah	0
11	1.04.000205	Sistem dan kapasitas pelayanan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) permukiman	Dokumen	6
12	1.04.000266	Jumlah prasarana untuk menunjang fungsi permukiman yang dilakukan penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Unit	0
13	1.04.000284	Jumlah rumah yang terdampak pelaksanaan peremajaan kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	Unit	0
14	1.04.000287	Jumlah sarana untuk menunjang fungsi permukiman yang dilakukan penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Unit	0
15	1.04.000291	Jumlah utilitas untuk menunjang fungsi permukiman yang dilakukan penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Unit	0
16	1.04.000317	Peserta sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses pembiayaan perumahan	Orang	200
17	1.04.000328	Jumlah tanah dan/atau bangunan milik bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan operasional dan pemeliharaan	Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal)	0

1.05 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
1	1.05.000002	Aparatur kebakaran yang mengikuti bimbingan teknis penanggulangan kebakaran provinsi dan kabupaten/kota	Orang	0
2	1.05.000003	Aparatur kebakaran yang mengikuti bimbingan teknis pencegahan kebakaran provinsi dan kabupaten/kota	Orang	0
3	1.05.000004	Aparatur kebakaran yang mengikuti bimbingan teknis penyelamatan kebakaran provinsi dan kabupaten/kota	Orang	0

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
4	1.05.000005	Aparatur kebakaran yang mengikuti bimbingan teknis penyelamatan nonkebakaran provinsi dan kabupaten/kota	Orang	0
5	1.05.000010	Aparatur provinsi dan kabupaten/kota yang memperoleh pelatihan mitigasi bencana	Orang	580
6	1.05.000011	Aparatur provinsi dan kabupaten/kota yang memperoleh pelatihan pencegahan bencana	Orang	580
7	1.05.000012	Data kebencanaan	Dokumen	12
8	1.05.000019	Dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat tingkat provinsi	Dokumen	4
9	1.05.000020	Dokumen periodik penyelenggaraan standardisasi sarana dan prasarana alat pelindung diri secara berkala, sah, dan legal	Dokumen	1
10	1.05.000021	Dokumen periodik penyelenggaraan standardisasi sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran secara berkala, sah, dan legal	Dokumen	4
11	1.05.000022	Dokumen periodik penyelenggaraan standardisasi sarana dan prasarana pencegahan secara berkala, sah, dan legal	Dokumen	2
12	1.05.000024	Dokumen hasil pelaksanaan informasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait penanggulangan kebakaran	Dokumen	0
13	1.05.000025	Dokumen hasil pelaksanaan informasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan kebakaran	Dokumen	4
14	1.05.000026	Dokumen hasil pelaksanaan informasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait penyelamatan kebakaran dan nonkebakaran	Dokumen	0
15	1.05.000027	Dokumen hasil pelaksanaan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait penanggulangan kebakaran	Dokumen	0
16	1.05.000028	Dokumen hasil pelaksanaan edukasi kepada pemangku kepentingan dan	Dokumen	2

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
		masyarakat terkait pencegahan kebakaran		
17	1.05.000029	Dokumen hasil pelaksanaan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait penyelamatan kebakaran dan nonkebakaran	Dokumen	0
18	1.05.000037	Dokumen hasil pelaksanaan kerja sama antarlembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	Dokumen	1
19	1.05.000039	Dokumen hasil pelaksanaan komunikasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait penanggulangan kebakaran	Dokumen	0
20	1.05.000040	Dokumen hasil pelaksanaan komunikasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan kebakaran	Dokumen	0
21	1.05.000041	Dokumen hasil pelaksanaan komunikasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait penyelamatan kebakaran dan nonkebakaran	Dokumen	0
22	1.05.000043	Dokumen hasil pelaksanaan penyelenggaraan koordinasi antarwilayah kabupaten/kota dalam penanggulangan kebakaran dan nonkebakaran	Dokumen	0
23	1.05.000044	Dokumen hasil pelaksanaan penyelenggaraan kerja sama antarwilayah kabupaten/kota dalam penyelamatan kebakaran dan nonkebakaran	Dokumen	0
24	1.05.000045	Dokumen hasil pelaksanaan penyelenggaraan kerja sama antarwilayah kabupaten/kota dalam penanggulangan kebakaran dan nonkebakaran	Dokumen	0
25	1.05.000046	Dokumen hasil pelaksanaan penyelenggaraan kerja sama antarwilayah kabupaten/kota dalam pencegahan kebakaran dan nonkebakaran	Dokumen	0
26	1.05.000047	Dokumen hasil pelaksanaan penyelenggaraan koordinasi antarwilayah kabupaten/kota dalam	Dokumen	0

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
		penyelamatan kebakaran dan nonkebakaran		
27	1.05.000048	Dokumen hasil pelaksanaan penyelenggaraan koordinasi antarwilayah kabupaten/kota dalam pencegahan kebakaran dan nonkebakaran	Dokumen	0
28	1.05.000049	Dokumen hasil pelaksanaan penyelenggaraan koordinasi antarwilayah kabupaten/kota dalam pencegahan kebakaran dan nonkebakaran	Dokumen	0
29	1.05.000050	Dokumen hasil pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan kebakaran	Dokumen	5
30	1.05.000051	Dokumen hasil pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait penyelamatan kebakaran dan nonkebakaran	Dokumen	0
31	1.05.000055	Dokumen hasil pengendalian operasi kesiapsiagaan terhadap bencana	Dokumen	1
32	1.05.000057	Dokumen hasil pengendalian penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Dokumen	1
33	1.05.000061	Dokumen informasi daerah (kabupaten/kota) peta rawan kebakaran yang sah dan legal	Dokumen	0
34	1.05.000062	Dokumen informasi daerah (kabupaten/kota) rawan kebakaran yang sah dan legal	Dokumen	0
35	1.05.000067	Dokumen pemberkasan administrasi hasil penyidikan atas penerapan secara aktif operasional sekretariat bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	Laporan	1
36	1.05.000068	Dokumen pemberkasan administrasi hasil penyidikan atas perkara yang dapat disidangkan di tempat	Laporan	4
37	1.05.000069	Dokumen pemberkasan administrasi hasil penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah (Perda)	Dokumen	1.331

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
38	1.05.000072	Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) yang disusun	Dokumen	1
39	1.05.000078	Dokumen rencana induk sistem proteksi kebakaran yang sah dan legal	Dokumen	0
40	1.05.000079	Dokumen rencana kontingensi	Dokumen	2
41	1.05.000084	Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang disusun	Dokumen	1
42	1.05.000085	Dokumen secara periodik penyelenggaraan standardisasi sarana dan prasarana evakuasi secara berkala, sah, dan legal	Dokumen	1
43	1.05.000086	Dokumen secara periodik penyelenggaraan standardisasi sarana dan prasarana pencarian terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan secara berkala, sah, dan legal	Dokumen	0
44	1.05.000087	Dokumen secara periodik penyelenggaraan standardisasi sarana dan prasarana pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan secara berkala, sah, dan legal	Dokumen	1
45	1.05.000095	Dokumen yang memuat data dampak kebakaran yang terintegrasi dan valid	Dokumen	0
46	1.05.000096	Dokumen yang memuat data kejadian kebakaran yang terintegrasi dan valid	Dokumen	0
47	1.05.000097	Dokumen yang memuat data penyelamatan yang terintegrasi dan valid	Dokumen	0
48	1.05.000107	Informasi kebencanaan	Dokumen	12
49	1.05.000109	Kabupaten/kota yang memiliki Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP)	Kabupaten/ Kota	5
50	1.05.000130	Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran	Laporan	2
51	1.05.000131	Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan pencegahan kebakaran	Laporan	1

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
52	1.05.000132	Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan penyelamatan kebakaran dan nonkebakaran	Laporan	2
53	1.05.000134	Laporan hasil koordinasi respons cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	Laporan	0
54	1.05.000168	Laporan hasil pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Peraturan daerah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	Laporan	4
55	1.05.000169	Laporan hasil pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Peraturan Gubernur sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	Laporan	4
56	1.05.000170	Laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan daerah	Laporan	4
57	1.05.000171	Laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur	Laporan	4
58	1.05.000179	Laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah (Perda)	Laporan	1
59	1.05.000180	Laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam mendukung penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah (Perda)	Laporan	1
60	1.05.000185	Laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan Peraturan Daerah	Laporan	5
61	1.05.000186	Laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan Peraturan Gubernur	Laporan	5
62	1.05.000192	Laporan hasil pembinaan aparatur pemadam kebakaran provinsi dan kabupaten/kota	Laporan	4
63	1.05.000195	Laporan hasil pembinaan aparatur penyelamatan provinsi dan kabupaten/kota	Laporan	0
64	1.05.000198	Laporan hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan	Laporan	0

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
		penanggulangan bencana kabupaten/kota di wilayah provinsi		
65	1.05.000199	Laporan hasil pengawasan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran	Laporan	0
66	1.05.000200	Laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pencegahan kebakaran	Laporan	0
67	1.05.000201	Laporan hasil pengawasan penyelenggaraan penyelamatan kebakaran dan nonkebakaran	Laporan	0
68	1.05.000206	Laporan pelaksanaan evakuasi korban bencana	Laporan	12
69	1.05.000207	Laporan pelaksanaan gladi kesiapsiagaan untuk bencana prioritas provinsi	Laporan	1
70	1.05.000209	Laporan pelaksanaan pencarian korban bencana	Laporan	0
71	1.05.000210	Laporan pelaksanaan pertolongan korban bencana	Laporan	0
72	1.05.000211	Laporan pelaksanaan respons cepat bencana nonalam epidemi/wabah penyakit	Laporan	0
73	1.05.000212	Laporan pelaksanaan respons cepat penanganan darurat bencana	Laporan	12
74	1.05.000217	Orang yang tersedia untuk melaksanakan sosialisasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) rawan bencana (per jenis bencana) lintas kabupaten/kota	Orang	15
75	1.05.000218	Peralatan pelindung diri terhadap bencana	Unit	4.000
76	1.05.000222	Personel Tim Reaksi Cepat (TRC) tingkat provinsi yang dikembangkan kapasitas manajerialnya dalam melaksanakan penanganan awal darurat bencana	Orang	60
77	1.05.000223	Personel Tim Reaksi Cepat (TRC) tingkat provinsi yang dikembangkan kapasitas teknis dalam melaksanakan penanganan awal darurat bencana	Orang	267
78	1.05.000226	Regulasi pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah	Dokumen	1

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
79	1.05.000228	Sarana dan prasarana evakuasi yang sah dan legal sesuai dengan standar teknis terkait	Unit	3
80	1.05.000230	Sarana dan prasarana pencarian terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan yang sah dan legal sesuai dengan standar teknis terkait	Unit	0
81	1.05.000231	Sarana dan prasarana pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan yang sah dan legal sesuai dengan standar teknis terkait	Unit	194
82	1.05.000234	Sarana dan prasarana yang tersedia untuk alat pelindung diri sesuai standar teknis terkait	Unit	5.076
83	1.05.000235	Sarana dan prasarana yang tersedia untuk penanggulangan kebakaran sesuai standar teknis terkait	Unit	8.468
84	1.05.000238	Sarana dan prasarana yang tersedia untuk pencegahan sesuai standar teknis terkait	Unit	0
85	1.05.000256	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dalam penanganan keadaan darurat provinsi	Orang	100
86	1.05.000257	Bimbingan teknis pascabencana provinsi	Orang	0
87	1.05.000258	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana provinsi	Lembaga	28
88	1.05.000260	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam penanganan keadaan darurat provinsi	Orang	100
89	1.05.000261	Penyusunan rencana operasi kedaruratan bencana provinsi	Dokumen	1
90	1.05.000262	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	1
91	1.05.000263	Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Masyarakat (Linmas) tingkat provinsi	Dokumen	1
92	1.05.000269	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) satuan perlindungan masyarakat	Orang	50

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
93	1.05.000270	Pembentukan tim penilai angka kredit dan sekretariat pengelolaan jabatan fungsional Polisi Pamong Praja (Pol PP)	Dokumen	1
94	1.05.000271	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat tingkat provinsi	Dokumen	4
95	1.05.000272	Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	1
96	1.05.000281	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penegakan Peraturan daerah (ruang pemeriksaan, gelar perkara, dan ruang penyimpanan barang bukti)	Unit	728
97	1.05.000283	Peningkatan kompetensi teknis aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan provinsi dan kabupaten/kota	Laporan	0
98	1.05.000284	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota	Laporan	0
99	1.05.000285	Pemutakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran	Dokumen	0
100	1.05.000286	Penyusunan kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	1
101	1.05.000287	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)		0
102	1.05.000288	Penyelenggaraan jabatan fungsional pemadam kebakaran	Dokumen	0
103	1.05.000289	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) melalui pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)	Orang	100
104	1.05.000290	Dukungan operasional sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Laporan	1
105	1.05.000291	Kerja sama antarlembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan penegakan Peraturan daerah	Dokumen	5

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
106	1.05.000292	Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) penegak Peraturan Daerah	Laporan	1
107	1.05.000293	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Dokumen	5
108	1.05.000297	Pembinaan dan pengawasan penguatan kapasitas penyelenggaraan urusan kebakaran di kabupaten/kota	Laporan	0
109	1.05.000313	Penyediaan layanan informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen	1
110	1.05.000314	Penyusunan peta rawan gangguan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Dokumen	0
111	1.05.000317	Penyusunan norma, standar, prosedur, dan manual dalam daerah kabupaten/kota	Dokumen	0
112	1.05.000329	Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang investigasi kebakaran		0
113	1.05.000348	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	100

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
1	1.06.000002	Alat bantu yang diterima lanjut usia terlantar di dalam panti	Orang	250
2	1.06.000003	Alat bantu yang diterima penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Unit	111
3	1.06.000015	Anak terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang	815
4	1.06.000017	Anak terlantar yang mendapatkan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal di dalam panti	Orang	815
5	1.06.000019	Anak terlantar yang menerima kebutuhan sandang di dalam panti	Orang	815
6	1.06.000026	Anak yang mendapatkan orang tua asuh/orang tua angkat	Orang	40
7	1.06.000030	Bangunan dan sarana prasarana panti sosial gelandangan dan pengemis	Unit	1.923
8	1.06.000045	Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang	1.923

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
9	1.06.000046	Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal di dalam panti	Orang	1.923
10	1.06.000048	Gelandangan dan pengemis yang menerima kebutuhan sandang di dalam panti	Orang	1.923
11	1.06.000056	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Keluarga	193.359
12	1.06.000058	Keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin	Keluarga	534.191
13	1.06.000061	Koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas	Kegiatan	2
14	1.06.000066	Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	Dokumen	12
15	1.06.000068	Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi	Orang	5.186
16	1.06.000069	Korban bencana yang mendapatkan kebutuhan sandang pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana	Orang	39.157
17	1.06.000070	Korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial	Orang	1.640
18	1.06.000072	Korban bencana yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap darurat	Orang	279.113
19	1.06.000076	Lanjut usia terlantar yang mendapat permakanan sesuai dengan standar gizi minimal di dalam panti	Orang	1.368
20	1.06.000080	Lanjut usia terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang	1.368
21	1.06.000082	Lanjut usia terlantar yang menerima kebutuhan sandang di dalam panti	Orang	1.368
22	1.06.000090	Lembaga kesejahteraan sosial	Lembaga	2.656
23	1.06.000092	Makam pahlawan	Makam	0
24	1.06.000095	Orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Orang	1.903
25	1.06.000096	Pekerja profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	15.347
26	1.06.000097	Pekerja profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	15.508
27	1.06.000099	Pekerja sosial masyarakat	Orang	1.589

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
28	1.06.000100	Pekerja sosial profesional yang memberikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	15.347
29	1.06.000101	Pekerja sosial profesional yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	15.508
30	1.06.000103	Pelaksanaan pengamanan taman makam pahlawan nasional	Laporan	0
31	1.06.000104	Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana panti sosial anak terlantar	Unit	0
32	1.06.000105	Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana panti sosial gelandangan dan pengemis	Unit	0
33	1.06.000106	Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana panti sosial lanjut usia terlantar	Unit	0
34	1.06.000107	Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana panti sosial penyandang disabilitas terlantar	Unit	0
35	1.06.000108	Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana panti sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di luar *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome* (HIV/AIDS)	Unit	1
36	1.06.000125	Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang	3.981
37	1.06.000126	Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal di dalam panti	Orang	3.981
38	1.06.000127	Penyandang disabilitas terlantar yang menerima kebutuhan sandang di dalam panti	Orang	3.981
39	1.06.000145	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di luar *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome* (HIV/AIDS) yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang	210
40	1.06.000146	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di luar *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome* (HIV/AIDS) yang mendapatkan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal di dalam panti	Orang	210

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
41	1.06.000148	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di luar *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome* (HIV/AIDS) yang menerima kebutuhan sandang di dalam panti	Orang	210
42	1.06.000150	Sarana dan prasarana di taman makam pahlawan yang direhabilitasi	Unit	0
43	1.06.000151	Sarana prasarana perkantoran yang dimiliki panti sosial anak terlantar	Unit	0
44	1.06.000152	Sarana prasarana perkantoran yang dimiliki panti sosial gelandangan dan pengemis	Unit	0
45	1.06.000153	Sarana prasarana perkantoran yang dimiliki panti sosial lanjut usia terlantar	Unit	0
46	1.06.000154	Sarana prasarana perkantoran yang dimiliki panti sosial penyandang disabilitas terlantar	Unit	0
47	1.06.000155	Sarana prasarana perkantoran yang dimiliki panti sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di luar *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome* (HIV/AIDS)	Unit	0
48	1.06.000156	Standar sarana prasarana panti sosial anak terlantar	Unit	0
49	1.06.000157	Standar sarana prasarana panti sosial gelandangan dan pengemis	Unit	0
50	1.06.000158	Standar sarana prasarana panti sosial lanjut usia terlantar	Unit	0
51	1.06.000159	Standar sarana prasarana panti sosial penyandang disabilitas terlantar	Unit	0
52	1.06.000160	Standar sarana prasarana panti sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di luar *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome* (HIV/AIDS)	Unit	1
53	1.06.000161	Tempat penampungan pengungsi yang tersedia	Unit	53
54	1.06.000162	Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan	Orang	78
55	1.06.000164	Tenaga pelayanan panti sosial anak terlantar	Orang	155
56	1.06.000165	Tenaga pelayanan panti sosial gelandangan dan pengemis	Orang	100
57	1.06.000166	Tenaga pelayanan panti sosial lanjut usia terlantar	Orang	148
58	1.06.000167	Tenaga pelayanan panti sosial penyandang disabilitas terlantar	Orang	326

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
59	1.06.000168	Tenaga pelayanan panti sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di luar *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome* (HIV/AIDS)	Orang	42
60	1.06.000170	Taruna siaga bencana	Orang	1.286
61	1.06.000178	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) keluarga	Keluarga	0
62	1.06.000179	Potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan	Orang	78
63	1.06.000204	Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	Orang	0
64	1.06.000206	Tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Orang	0
65	1.06.000208	Tenaga yang mendapatkan peningkatan kompetensi	Orang	0
66	1.06.000209	Kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	Desa/ Kelurahan	0
67	1.06.000211	Orang yang diberikan pelayanan ziarah dan studi di taman makam pahlawan nasional	Orang	0
68	1.06.000212	Orang yang dimakamkan di taman makam pahlawan nasional	Orang	0
69	1.06.000213	Badan usaha yang melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan	Badan Usaha	25
70	1.06.000214	Sumber Daya Manusia (SDM) kesejahteraan sosial daerah provinsi yang diusulkan mendapat sertifikasi	Orang	948
71	1.06.000215	Lembaga kesejahteraan sosial daerah provinsi yang diusulkan mendapat akreditasi	Lembaga	11
72	1.06.000218	Orang yang diusulkan sebagai calon pahlawan nasional	Orang	4
73	1.06.000231	Pendamping program bantuan sosial yang mendapatkan pengembangan potensi	Orang	0

2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
1	2.07.000001	Angkatan Kerja (AK)	Orang	5.458.799
2	2.07.000002	Asosiasi pengusaha dan Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB) Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan	Asosiasi	6.946

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
		(WLKP) dalam jaringan (daring) yang diverifikasi		
3	2.07.000005	Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Orang	1.014
4	2.07.000008	Data penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan yang diselesaikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagakerjaan	Kasus	0
5	2.07.000009	Data perusahaan yang mendapatkan layanan uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Perusahaan	12.492
6	2.07.000010	Data perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan	Perusahaan	2.018
7	2.07.000018	Instruktur pemerintah	Orang	75
8	2.07.000019	Instruktur swasta	Orang	213
9	2.07.000024	Kapasitas terpasang pemerintah	Orang	9.684
10	2.07.000029	Kecelakaan kerja	Kasus	50.474
11	2.07.000032	Lembaga bipartit	Lembaga	237
12	2.07.000035	Lembaga pelatihan pemerintah yang terakreditasi	Unit	8
13	2.07.000036	Lembaga pelatihan swasta yang terakreditasi	Unit	134
14	2.07.000038	Lembaga Kerja Sama (LKS) tripartit	Lembaga	1
15	2.07.000046	Lulusan pelatihan pemerintah	Orang	8.627
16	2.07.000047	Lulusan pelatihan swasta	Orang	25.974
17	2.07.000048	Mediator	Orang	53
18	2.07.000049	Nama program pelatihan	Program	83
19	2.07.000053	Pencari kerja (Pencaker) yang mengikuti bimbingan jabatan	Orang	600
20	2.07.000056	Pencari kerja	Orang	35.632
21	2.07.000057	Pencari kerja ditempatkan	Orang	33.137
22	2.07.000058	Pencari kerja terdaftar	Orang	35.632
23	2.07.000059	Pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui *job fair*/bursa kerja	Orang	2.894
24	2.07.000066	Penduduk Usia Kerja (PUK)	Orang	8.430.623
25	2.07.000069	Pengawas ketenagakerjaan	Orang	27
26	2.07.000072	Penyelesaian kasus hubungan industrial melalui perjanjian bersama	Kasus	236
27	2.07.000078	Perkara perselisihan yang terselesaikan	Kasus	839
28	2.07.000080	Persediaan tenaga kerja	Orang	5.458.799
29	2.07.000082	Perusahaan atau lembaga yang terdaftar sebagai Lembaga	Perusahaan	19

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
		Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)		
30	2.07.000083	Perusahaan dengan tenaga kerja minimal 50 orang	Perusahaan	13.606
31	2.07.000086	Perusahaan mikro, kecil, menengah, dan besar	Perusahaan	523.262
32	2.07.000087	Perusahaan peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) aktif	Perusahaan	115.985
33	2.07.000088	Perusahaan yang melapor ketenagakerjaan	Perusahaan	523.262
34	2.07.000089	Perusahaan yang mendapatkan pembinaan pengupahan skala provinsi	Perusahaan	200
35	2.07.000090	Perusahaan yang sudah menerapkan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Perusahaan	2.018
36	2.07.000091	Perusahaan yang sudah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	Perusahaan	387
37	2.07.000092	Perusahaan yang wajib menerapkan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Perusahaan	7.300
38	2.07.000093	Perusahaan yang wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	Perusahaan	7.300
39	2.07.000094	Perusahaan yang diaudit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	Perusahaan	387
40	2.07.000097	Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ditempatkan	Orang	2.078
41	2.07.000100	Produktivitas tenaga kerja	Juta Rupiah per Tenaga Kerja	437.513.918
42	2.07.000102	Sarana pelatihan kerja kabupaten/kota	Unit	721
43	2.07.000109	Tenaga kerja disabilitas	Orang	103
44	2.07.000110	Tenaga kerja peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) aktif	Orang	5.752.333
45	2.07.000114	Tenaga kerja yang tercipta dari adanya perluasan kesempatan kerja	Orang	6.610
46	2.07.000121	Upah minimum provinsi	Surat Keputusan	1
47	2.07.000125	Dokumen kerjasama pelatihan vokasi	Dokumen	8
48	2.07.000126	Perusahaan menengah	Perusahaan	225
49	2.07.000127	Pengawasan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS),	Lembaga	40

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
		Lembaga Penempatan Pekerja Rumah Tangga (LPPRT), dan portal kerja		

2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
1	2.08.000014	Dokumen penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data provinsi	Dokumen	2
2	2.08.000022	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan provinsi	Kegiatan	1
3	2.08.000027	Layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota	Layanan	13
4	2.08.000033	Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi yang mendapat advokasi dan pendampingan	Lembaga	2
5	2.08.000035	Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga kewenangan provinsi yang mendapat advokasi dan pendampingan	Lembaga	180
6	2.08.000037	Organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan provinsi kepada organisasi masyarakat di kabupaten/kota	Organisasi	336
7	2.08.000050	Perangkat daerah yang mengikuti advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) kewenangan provinsi	Perangkat Daerah	33
8	2.08.000052	Perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan provinsi yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan spesifik	Orang	1.300
9	2.08.000053	Perempuan korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota yang mendapatkan layanan pengaduan masyarakat	Orang	1.382
10	2.08.000056	Sumber Daya Manusia (SDM) di penyedia layanan pemberdayaan	Orang	2.130

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
		perempuan kewenangan provinsi yang mendapat peningkatan kapasitas		
11	2.08.000058	Sumber Daya Manusia (SDM) di penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	260
12	2.08.000060	Sumber Daya Manusia (SDM) penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga kewenangan provinsi yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	300
13	2.08.000062	Penguatan jejaring antarlembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	Kegiatan	1
14	2.08.000063	Perangkat daerah yang mengikuti sosialisasi kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Perangkat Daerah	33
15	2.08.000066	Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak	Kegiatan	1

2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
1	2.09.000021	Jenis pangan lokal	Laporan	0
2	2.09.000092	Jumlah advokasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA)	Laporan	0
3	2.09.000100	Jumlah dokumen pelaksanaan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) keamanan pangan per tahun	Dokumen	1
4	2.09.000102	Jumlah dokumen penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kelembagaan yang disusun	Dokumen	0
5	2.09.000103	Jumlah dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) kelembagaan yang disusun	Dokumen	0
6	2.09.000104	Jumlah edukasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA)	Laporan	1
7	2.09.000115	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi informasi stok, pasokan, dan harga pangan secara berkala	Laporan	12
8	2.09.000116	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan advokasi, edukasi, dan sosialisasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA)	Laporan	1

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
9	2.09.000123	Jumlah pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Provinsi	Laporan	0
10	2.09.000137	Jumlah usaha pangan lokal	Laporan	0
11	2.09.000138	Jumlah pangan pokok yang terdistribusi	Laporan	0
12	2.09.000139	Jumlah pangan lainnya yang terdistribusi	Laporan	0
13	2.09.000146	Jumlah sosialisasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA)	Laporan	1
14	2.09.000147	Jumlah kelompok masyarakat yang memperoleh advokasi, edukasi, dan sosialisasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA)	Laporan	1
15	2.09.000148	Indeks ketahanan pangan level kecamatan	Dokumen	7
16	2.09.000154	Jumlah sertifikat keamanan dan/atau mutu pangan per tahun	Sertifikat	510
17	2.09.000158	Rekomendasi keamanan dan/atau mutu pangan segar asal tumbuhan lintas daerah kabupaten/kota yang diterbitkan	Dokumen	12
18	2.09.000160	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan segar	Persen	0
19	2.09.000211	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi distribusi pangan pokok	Laporan	3
20	2.09.000212	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi distribusi pangan lainnya	Laporan	3
21	2.09.000216	Jumlah pengadaan cadangan pangan pemerintah	Ton	0
22	2.09.000219	Jenis prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Unit	0

2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
1	2.10.000020	Data inventarisasi penggunaan tanah	Dokumen	1
2	2.10.000069	Dokumen kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah terhadap Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi	Dokumen	1

2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
1	2.11.000002	Audit lingkungan hidup yang diterbitkan oleh provinsi	Laporan	13

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
2	2.11.000017	Data pengelolaan limbah B3 dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan kewenangan pemerintah di wilayah provinsi	Dokumen	2
3	2.11.000021	Data pengujian parameter kualitas lingkungan	Data	0
4	2.11.000025	Dokumen dan data inventarisasi lingkungan hidup	Dokumen	7
5	2.11.000027	Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang telah diterbitkan oleh provinsi	Dokumen	13
6	2.11.000029	Dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup	Dokumen	4
7	2.11.000045	Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) yang telah diterbitkan oleh provinsi sampai dengan n-1	Dokumen	0
8	2.11.000047	Hasil pengaduan masyarakat terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	Aduan	87
9	2.11.000053	Izin usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan Pemerintah Provinsi (Pemprov)	Izin	2.039
10	2.11.000054	Izin usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang dilakukan pengawasan	Izin	1.052
11	2.11.000055	Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) lainnya yang telah diterbitkan provinsi sampai dengan n-1	Izin	0
12	2.11.000057	Izin usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan Pemerintah Provinsi (Pemprov)	Izin	1.052
13	2.11.000059	Izin usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi yang dilakukan pengawasan	Izin	1.052
14	2.11.000061	Kapasitas operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) regional	Ton	2.578.090
15	2.11.000064	Kebun raya yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	Unit	0

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
16	2.11.000079	Laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Dokumen	1.052
17	2.11.000085	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK), penurunan emisi/Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK)/perubahan iklim yang menjadi kewenangan provinsi	Dokumen	3
18	2.11.000088	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan pemerintah pusat dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan	Dokumen	2
19	2.11.000098	Laporan hasil koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	Dokumen	13
20	2.11.000099	Laporan hasil pendampingan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan	Dokumen	3
21	2.11.000101	Laporan hasil penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup tingkat daerah provinsi	Dokumen	4
22	2.11.000103	Laporan kegiatan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK), penurunan emisi/Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK)/perubahan iklim yang menjadi kewenangan provinsi di 5 sektor	Dokumen	3
23	2.11.000107	Lembaga/kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang lingkungan hidup	Lembaga	807
24	2.11.000115	Lokasi Program Kampung Iklim (Proklim) yang dibina oleh provinsi	Lokasi	27
25	2.11.000117	Luasan kebun raya yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	Hektare	0
26	2.11.000119	Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	Hektare	3.703,56

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
27	2.11.000121	Luasan Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	Hektare	0
28	2.11.000123	Luasan Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) lainnya yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	Hektare	0
29	2.11.000124	Masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang dilakukan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Orang	472.000
30	2.11.000128	Nilai Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	56
31	2.11.000129	Nilai Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Poin	78
32	2.11.000130	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	56
33	2.11.000131	Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Poin	0
34	2.11.000132	Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	57
35	2.11.000133	Orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang lingkungan hidup	Orang	209
36	2.11.000134	Pengaduan masyarakat terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) provinsi yang masuk	Aduan	117
37	2.11.000136	Permohonan kelayakan lingkungan hidup	Dokumen	4
38	2.11.000143	Persetujuan lingkungan hidup	Dokumen	4
39	2.11.000144	Persetujuan lingkungan yang telah diterbitkan	Persetujuan	1.052
40	2.11.000154	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	Unit	6.018
41	2.11.000162	Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	Unit	0
42	2.11.000164	Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) lainnya yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	Unit	0
43	2.11.000166	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) regional yang beroperasi	Unit	1
44	2.11.000168	Usaha/kegiatan yang teridentifikasi melakukan pelanggaran terhadap upaya dan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Usaha/Kegiatan	833

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
45	2.11.000169	Volume residu sampah yang dilakukan pemrosesan akhir Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) regional	Ton	2.578.090
46	2.11.000178	Volume timbulan sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) regional	Ton	2.578.090
47	2.11.000182	Jumlah alat pemantau kualitas lingkungan di provinsi yang beroperasi dan terpelihara	Unit	0
48	2.11.000183	Jumlah data contoh uji	Data	0
49	2.11.000184	Jumlah data pengujian parameter kualitas lingkungan	Data	0
50	2.11.000186	Jumlah dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup	Dokumen	0
51	2.11.000187	Jumlah dokumen hasil analisis/pengolahan data inventarisasi (termasuk daftar isu strategis)	Dokumen	7
52	2.11.000190	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditinjau ulang	Dokumen	0
53	2.11.000194	Jumlah hasil pengaduan masyarakat terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	Aduan	117
54	2.11.000196	Jumlah izin usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang dilakukan pengawasan	Izin	1.052
55	2.11.000199	Jumlah izin usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan Pemerintah Provinsi (Pemprov)	Izin	1.052
56	2.11.000202	Jumlah izin usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi yang dilakukan pengawasan	Izin	1.052
57	2.11.000203	Jumlah izin usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan Pemerintah Provinsi (Pemprov)	Izin	1.052
58	2.11.000219	Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Dokumen	1.052

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
59	2.11.000249	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) provinsi yang masuk	Aduan	117
60	2.11.000317	Persetujuan teknis pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai kewenangannya yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan	Dokumen	0
61	2.11.000338	Data dokumen kebijakan terkait dengan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	0
62	2.11.000342	Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan persetujuan teknis pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang diterbitkan sesuai dengan kewenangannya	Usaha	0

2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
1	2.12.000007	Dokumen tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan penyusunan pelaporan Administrasi Kependudukan (Adminduk) terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Dokumen	0
2	2.12.000011	Dokumen hasil kerja sama organisasi masyarakat dan perguruan tinggi	Dokumen	0
3	2.12.000013	Dokumen hasil komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	Dokumen	4
4	2.12.000014	Dokumen hasil komunikasi, informasi, dan edukasi terkait pendaftaran penduduk	Dokumen	4
5	2.12.000015	Dokumen hasil koordinasi berkala antarlembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah kewenangan provinsi	Dokumen	15
6	2.12.000016	Dokumen hasil koordinasi berkala antarlembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah kewenangan provinsi terkait pencatatan sipil	Dokumen	266

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
7	2.12.000018	Dokumen hasil pemanfaatan data atas peristiwa penting	Dokumen	7.905
8	2.12.000019	Dokumen hasil pemanfaatan data kependudukan	Dokumen	33
9	2.12.000021	Dokumen hasil pemanfaatan data peristiwa kependudukan	Dokumen	0
10	2.12.000022	Dokumen hasil penataan tata kelola pelaksanaan pencatatan sipil skala provinsi	Dokumen	0
11	2.12.000029	Dokumen hasil penyusunan tata cara pengelolaan data kependudukan yang bersifat data perseorangan, data agregat, dan data pribadi di provinsi dan kabupaten/kota	Dokumen	0
12	2.12.000030	Dokumen hasil tata kelola pelaksanaan pendaftaran penduduk skala provinsi	Dokumen	0
13	2.12.000031	Dokumen kebijakan teknis di bidang pencatatan sipil ditetapkan	Dokumen	1
14	2.12.000036	Dokumen komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencatatan sipil	Dokumen	4
15	2.12.000038	Dokumen pendataan penduduk nonpermanen dan rentan administrasi kependudukan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi	Dokumen	1
16	2.12.000041	Dokumen penetapan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk berdasarkan kebijakan nasional	Dokumen	10
17	2.12.000043	Dokumen penyediaan data kependudukan provinsi	Dokumen	3
18	2.12.000045	Dokumen penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan lain	Dokumen	7
19	2.12.000048	Dokumen tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan penyusunan pelaporan Administrasi Kependudukan (Adminduk) terkait pencatatan sipil yang disusun	Dokumen	0
20	2.12.000049	Dokumen tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan penyusunan pelaporan Administrasi Kependudukan (Adminduk) terkait pendaftaran penduduk yang disusun	Dokumen	0

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
21	2.12.000054	Laporan hasil pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Laporan	4
22	2.12.000055	Laporan hasil bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk	Laporan	1
23	2.12.000058	Laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan	Laporan	1
24	2.12.000059	Laporan hasil fasilitasi pelayanan bidang pencatatan sipil di kabupaten/kota	Laporan	1
25	2.12.000064	Laporan hasil konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil	Laporan	12
26	2.12.000065	Laporan hasil konsultasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Laporan	12
27	2.12.000066	Laporan hasil konsultasi penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Laporan	708
28	2.12.000070	Laporan hasil koordinasi berkala antarlembaga pemérintah dan lembaga nonpemerintah kewenangan provinsi terkait pendaftaran penduduk	Laporan	1
29	2.12.000075	Laporan hasil pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk	Laporan	14
30	2.12.000080	Laporan hasil sosialisasi pendaftaran penduduk	Laporan	6
31	2.12.000082	Laporan hasil sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan	Laporan	1
32	2.12.000083	Laporan hasil sosialisasi terkait pencatatan sipil	Laporan	1
33	2.12.000084	Laporan pembinaan dan pengawasan terkait pencatatan sipil	Laporan	4
34	2.12.000093	Sumber daya manusia yang mengikuti bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan	Orang	579
35	2.12.000095	Penyediaan data agregat kependudukan provinsi dan kabupaten/kota	Data	2
36	2.12.000096	Rekap lembaga yang memanfaatkan data kependudukan provinsi dan kabupaten/kota	Lembaga	14

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
37	2.12.000101	Sumber Daya Manusia yang mengikuti bimbingan teknis terkait administrasi kependudukan	Orang	1.334

2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
1	2.13.000008	Buku register desa	Dokumen	0
2	2.13.000009	Badan Usaha Milik (BUM) Desa di kabupaten/kota	Dokumen	0
3	2.13.000015	Dokumen hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Dokumen	1
4	2.13.000030	Laporan hasil fasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Laporan	1
5	2.13.000069	Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain	Lembaga Desa dan Desa Adat	7

2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
1	2.14.000013	Data dan informasi keluarga yang tersedia	Laporan	1
2	2.14.000027	Dokumen profil Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Dokumen	1
3	2.14.000030	Fasilitasi, pembimbingan, pengembangan, dan penguatan penyiapan pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Kegiatan	1
4	2.14.000060	Media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang untuk advokasi, promosi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) (Bangga Kencana) yang telah sesuai kearifan budaya lokal	Laporan	5

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
5	2.14.000069	Orang yang telah menerima advokasi dan promosi indeks pembangunan keluarga (iBangga)	Laporan	0
6	2.14.000093	Penguatan kerja sama pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal, nonformal, dan informal	Kegiatan	24
7	2.14.000100	Penyelenggaraan sistem informasi keluarga	Laporan	30
8	2.14.000103	Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang telah mengikuti peningkatan kapasitas pengelola dan pelaksana	Organisasi	90
9	2.14.000118	Unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), serta Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS))	Unit	75

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
1	2.15.000000	Dokumen pemeriksaan kondisi fisik kendaraan bermotor umum	Dokumen	5
2	2.15.000003	Alat pemberi isyarat lalu lintas	Unit	629
3	2.15.000004	Alat pengawasan dan pengamanan jalan	Unit	6
4	2.15.000006	Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan	Unit	3.109
5	2.15.000019	Daftar Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat	Dokumen	3
6	2.15.000024	Data fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan pengumpan regional yang tersedia	Unit	6
7	2.15.000025	Data fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan sungai dan danau yang tersedia	Unit	10
8	2.15.000032	Data pelabuhan pengumpan regional	Dokumen	1
9	2.15.000041	Data angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota provinsi	Dokumen	8

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
10	2.15.000072	Data fasilitas utama yang terehabilitasi dan terpelihara	Dokumen	9
11	2.15.000078	Data jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota	Unit	2
12	2.15.000079	Data jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan	Unit	2
13	2.15.000091	Data laporan angkutan laut kewenangan provinsi yang telah terdaftar dalam perizinan	Laporan	4
14	2.15.000114	Data pelaksanaan sosialisasi pada media cetak	Dokumen	0
15	2.15.000115	Data pelaksanaan sosialisasi media elektronik	Dokumen	0
16	2.15.000116	Data pelaksanaan sosialisasi penyampaian langsung kepada masyarakat	Dokumen	0
17	2.15.000117	Data pelayanan angkutan barang	Unit	2
18	2.15.000118	Data pelayanan angkutan orang	Unit	2
19	2.15.000120	Data pemberian kemudahan bagi penyandang disabilitas	Dokumen	6
20	2.15.000121	Data pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki	Dokumen	6
21	2.15.000143	Data perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	Dokumen	9.146
22	2.15.000178	Data Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	Dokumen	5
23	2.15.000188	Dokumentasi pelaksanaan forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan provinsi	Laporan	4
24	2.15.000191	Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan	Unit	6
25	2.15.000193	Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas	Unit	6
26	2.15.000198	Izin lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Dokumen	1
27	2.15.000203	Laporan pengawasan pelaksanaan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah	Laporan	0
28	2.15.000205	Laporan pengawasan pelaksanaan izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah	Laporan	0

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
29	2.15.000207	Laporan pengawasan pelaksanaan izin usaha prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah	Laporan	0
30	2.15.000210	Marka jalan	Unit	6
31	2.15.000224	Rambu lalu lintas	Unit	9.395
32	2.15.000236	Rencana teknis bangunan pelabuhan yang paling sedikit memuat: a) gambar yang memuat situasi atau rencana tapak, denah, tampak, dan potongan; b) gambar rencana pondasi termasuk detailnya; c) gambar rencana kolom, balok, plat, dan detailnya; d) kondisi tanah (log bor/stratigrafi); e) rencana penempatan fasilitas Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); f) koordinat geografis minimal 4 (empat) titik, yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan 2 (dua) titik di darat	Dokumen	10
33	2.15.000240	Salinan dokumen rencana induk pelabuhan	Dokumen	10
34	2.15.000241	Sistem dan prosedur pelayanan kapal dan barang	Dokumen	2
35	2.15.000245	Marka jalan	Meter	55.279
36	2.15.000250	Peraturan Gubernur mengenai rencana aksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi	Dokumen	0
37	2.15.000257	Data penindakan pelanggaran kendaraan bermotor	Dokumen	36
38	2.15.000258	Data jumlah pengadaan dan pemasangan sistem manajemen transportasi cerdas	Dokumen	0
39	2.15.000272	Dokumen pengawasan awak kendaraan bermotor umum	Dokumen	14
40	2.15.000273	Laporan pengawasan ketertiban terminal	Laporan	3
41	2.15.000274	Alat penerangan jalan	Unit	6
42	2.15.000275	Data kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan provinsi	Dokumen	8
43	2.15.000278	Dokumen pemeriksaan terhadap administrasi kendaraan	Dokumen	5
44	2.15.000281	Data pelayanan angkutan orang	Laporan	2
45	2.15.000312	Laporan koordinasi pengawasan angkutan laut yang telah terdaftar dalam perizinan	Laporan	4

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
46	2.15.000326	Sumber daya manusia di bidang pelayaran	Orang	2
47	2.15.000349	Data fasilitas pelabuhan	Dokumen	29
48	2.15.000351	Perjanjian konsesi pengusahaan	Dokumen	3
49	2.15.000378	Unit penyelenggara pelabuhan pengumpan regional	Dokumen	1
50	2.15.000416	Rambu peringatan	Unit	6
51	2.15.000417	Rambu larangan	Unit	6
52	2.15.000419	Pita penggaduh	Meter	4.554
53	2.15.000420	*Yellow box*	Meter	2.671,43

2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
1	2.16.000070	Rancangan kebijakan domain arsitektur infrastruktur dalam arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pemerintah daerah		2
2	2.16.000071	Rancangan kebijakan domain arsitektur aplikasi dalam arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pemerintah daerah		2
3	2.16.000072	Rancangan kebijakan peta rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pemerintah daerah		1
4	2.16.000073	Rancangan kebijakan rencana dan anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pemerintah daerah		1
5	2.16.000075	Data dan informasi dibagipakaikan	Data	4.644
6	2.16.000076	Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pemerintah daerah yang sudah ditempatkan di pusat data nasional	Aplikasi	1
7	2.16.000077	Pusat data pemerintah daerah yang menjadi bagian dari pusat data nasional	Unit	0
8	2.16.000078	Pusat komputasi yang terhubung dengan pusat data nasional	Unit	1
9	2.16.000079	Pusat kendali yang terhubung dengan pusat data nasional	Unit	1
10	2.16.000082	Perangkat daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan	Perangkat Daerah	42

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
		jaringan intra pemerintah daerah provinsi		
11	2.16.000084	Kabupaten/kota yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah provinsi	Kabupaten/ Kota	6
12	2.16.000085	Perangkat daerah yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	Perangkat Daerah	30
13	2.16.000086	Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pemerintah daerah yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	Aplikasi	23
14	2.16.000087	Sistem penghubung layanan pemerintah daerah yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Aplikasi	5
15	2.16.000088	Kapasitas kecepatan lebar pita yang tersedia di pemerintah daerah		1
16	2.16.000089	Perangkat daerah yang memiliki akses internet	Perangkat Daerah	42
17	2.16.000090	Perangkat daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh dinas	Perangkat Daerah	42
18	2.16.000091	Area publik yang memiliki akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Titik	2.582
19	2.16.000092	Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh pemerintah daerah	Aplikasi	13
20	2.16.000093	Aplikasi khusus yang didaftarkan ke Kementerian Komunikasi dan Digital	Aplikasi	7
21	2.16.000094	Aplikasi umum yang telah dimanfaatkan	Aplikasi	5
22	2.16.000098	Surat Keputusan (SK)/ketetapan pembentukan tim koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pemerintah daerah	Surat Keputusan	1
23	2.16.000099	Server yang dikelola pemerintah daerah	Unit	807
24	2.16.000100	Utilisasi server yang dikelola pemerintah daerah	Persen	86,07
25	2.16.000101	Perangkat keras media penyimpanan Teknologi Informasi	Unit	80

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
		dan Komunikasi (TIK) yang dikelola pemerintah daerah		
26	2.16.000102	Perangkat keras jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dikelola pemerintah daerah	Unit	704
27	2.16.000103	Perangkat keras keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dikelola pemerintah daerah	Unit	25
28	2.16.000104	Perangkat keras periferal Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dikelola pemerintah daerah	Unit	156
29	2.16.000105	Dokumen pelaksanaan manajemen aset Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Dokumen	4
30	2.16.000106	Dokumen pelaksanaan manajemen layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Dokumen	4
31	2.16.000107	Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Daerah (Pemda) yang memiliki latar belakang dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Orang	158
32	2.16.000110	Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mendapatkan literasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Orang	51
33	2.16.000111	Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) internal	Dokumen	0
34	2.16.000112	Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) eksternal	Dokumen	0
35	2.16.000114	Aduan masyarakat yang masuk ke kanal SP4N-LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)	Aduan	718
36	2.16.000115	Aduan masyarakat yang masuk ke kanal selain SP4N-LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)	Aduan	195.270
37	2.16.000116	Jumlah kanal pengaduan masyarakat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah (Pemda)	Kanal	15
38	2.16.000117	Frekuensi laporan isu publik yang dipantau	Laporan	12
39	2.16.000120	Strategi komunikasi publik yang disusun	Dokumen	70

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
40	2.16.000121	Komunikasi krisis yang telah dikelola	Laporan	4
41	2.16.000122	Prosedur penanganan komunikasi krisis	SOP	1
42	2.16.000124	Konten foto	Konten Digital	6.380
43	2.16.000125	Konten teks	Konten	71.271
44	2.16.000126	Konten grafis	Konten	933
45	2.16.000127	Konten audio visual	Konten	10.651
46	2.16.000128	Konten audio	Konten	0
47	2.16.000129	Konten digital yang menggunakan bahasa setempat	Konten	15
48	2.16.000130	Pertemuan tatap muka	Kegiatan	39
49	2.16.000131	Diseminasi melalui media berbayar	Kegiatan	1.167
50	2.16.000133	Diseminasi melalui shared media	Kegiatan	40
51	2.16.000134	Diseminasi melalui media komunikasi publik Pemerintah Daerah (Pemda)	Kegiatan	2.242
52	2.16.000135	Khalayak yang terpapar informasi publik melalui semua kanal	Orang	164.235.756
53	2.16.000136	Media cetak yang dikelola Pemerintah Daerah (Pemda)	Media	1
54	2.16.000138	Saluran Televisi (TV) yang dikelola Pemerintah Daerah (Pemda)	Saluran	0
55	2.16.000140	Radio milik Pemerintah Daerah (Pemda)	Radio	0
56	2.16.000142	Media daring yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda)	Media	1
57	2.16.000143	Akun media sosial yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda)		5
58	2.16.000144	Siaran pers yang dibuat	Siaran Pers	1.070
59	2.16.000145	Siaran pers yang dimuat di media	Siaran Pers	12
60	2.16.000146	Komunitas informasi masyarakat	Komunitas	8
61	2.16.000148	Permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	2.210
62	2.16.000149	Informasi berkala yang disediakan oleh pemerintah daerah	Informasi	40
63	2.16.000150	Informasi serta merta yang disediakan oleh pemerintah daerah	Informasi	36
64	2.16.000151	Informasi setiap saat yang disediakan oleh pemerintah daerah	Informasi	35
65	2.16.000152	Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Daerah (Pemda) yang	Orang	29

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
		memiliki latar belakang di bidang komunikasi publik		
66	2.16.000153	Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Daerah (Pemda) yang memiliki sertifikasi kompetensi di bidang komunikasi publik	Orang	21
67	2.16.000154	Laporan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di daerah	Laporan	1
68	2.16.000155	Pengaturan relasi media	Perda/Perkada	0
69	2.16.000156	Jaringan intra Pemerintah Daerah (Pemda) yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah	Unit	1.431
70	2.16.000157	Kabupaten/kota di wilayah provinsi yang mendapatkan sosialisasi program provinsi cerdas	Kabupaten/ Kota	5
71	2.16.000160	Jumlah media massa yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda)	Media	35
72	2.16.000161	Jumlah menara telekomunikasi	Unit	0
73	2.16.000162	Jumlah sebaran titik koordinat area tanpa sinyal	Titik	0

2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
1	2.17.000002	Dokumen hasil peningkatan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan	Dokumen	1
2	2.17.000003	Dokumen hasil peningkatan pemberian manfaat kepada anggota Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) dan masyarakat	Dokumen	1
3	2.17.000012	Koperasi yang memenuhi peraturan perundang-undangan	Unit Usaha	2.913
4	2.17.000013	Koperasi hasil pengukuran tingkat kesehatan	Unit Usaha	24
5	2.17.000014	Koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	Unit Usaha	24
6	2.17.000015	Koperasi yang akuntabilitas dan memberi manfaat kepada anggota Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) dan masyarakat	Unit Usaha	2.913
7	2.17.000016	Koperasi yang diberikan penilaian jatidiri koperasi, pertumbuhan dan kemandirian koperasi	Unit Usaha	24

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
8	2.17.000017	Koperasi yang diberikan penilaian manajemen	Unit Usaha	24
9	2.17.000018	Koperasi yang diberikan penilaian permodalan	Unit Usaha	24
10	2.17.000019	Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, serta akuntabel	Unit Usaha	2.913
11	2.17.000025	Koperasi yang telah dilakukan pengawasan ketangguhan koperasi kewenangan kabupaten/kota	Unit Usaha	9
12	2.17.000026	Koperasi yang telah dilakukan pengawasan kekuatan, koperasi kewenangan kabupaten/kota	Unit Usaha	9
13	2.17.000039	Unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan	Unit Usaha	10.047
14	2.17.000040	Unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mendapatkan fasilitas produksi	Unit Usaha	10.047
15	2.17.000041	Unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri	Unit Usaha	224.895
16	2.17.000042	Unit usaha yang memiliki akses pasar, akses pembiayaan	Unit Usaha	7
17	2.17.000043	Unit usaha yang memenuhi restrukturisasi usaha	Unit Usaha	2.913
18	2.17.000044	Unit usaha yang memenuhi standardisasi	Unit Usaha	301
19	2.17.000046	Unit usaha yang memiliki akses penguatan kelembagaan	Unit Usaha	2.913
20	2.17.000047	Unit usaha yang memiliki akses pasar	Unit Usaha	17.302
21	2.17.000048	Unit usaha yang memiliki penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standardisasi	Unit Usaha	2.913
22	2.17.000049	Unit usaha yang memiliki restrukturisasi usaha	Unit Usaha	2.913
23	2.17.000051	Unit usaha yang produktif	Unit Usaha	10.047
24	2.17.000052	Unit usaha yang produktif, bernilai tambah	Unit Usaha	10.047
25	2.17.000053	Unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	Unit Usaha	10

2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
1	2.18.000001	Aparatur yang telah mendapatkan bimbingan teknis pelaksanaan penanaman modal	Orang	403
2	2.18.000002	Aparatur yang telah mendapatkan bimbingan teknis	Orang	554
3	2.18.000004	Data perizinan berbasis sistem elektronik	Dokumen	576.804
4	2.18.000006	Informasi perizinan berbasis sistem elektronik	Dokumen	111.233
5	2.18.000007	Pelaku usaha yang dilayani pengaduannya terkait nonperizinan	Orang	74
6	2.18.000008	Pelaku usaha yang dilayani pengaduannya terkait pelayanan terpadu nonperizinan	Orang	3
7	2.18.000012	Pelaku usaha yang dilayani pengaduannya terkait perizinan	Orang	77
8	2.18.000015	Pelaku usaha yang menggunakan pelayanan terpadu nonperizinan berbasis sistem elektronik	Orang	180.894
9	2.18.000017	Pelaku usaha yang menggunakan perizinan berbasis sistem elektronik	Orang	226.611
10	2.18.000020	Peraturan daerah tentang promosi penanaman modal	Dokumen	1
11	2.18.000022	Peraturan daerah/provinsi tentang pemberian fasilitasi/insentif penanaman modal di daerah	Dokumen	1
12	2.18.000023	Peraturan daerah/provinsi tentang pemberian kemudahan berusaha penanaman modal di daerah	Dokumen	1
13	2.18.000024	Peraturan daerah/provinsi tentang penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	Dokumen	0
14	2.18.000025	Peraturan daerah/provinsi tentang penetapan pemberian fasilitas/insentif	Dokumen	1
15	2.18.000027	Peraturan kepala daerah tentang pemberian kemudahan berusaha penanaman modal di daerah	Dokumen	2
16	2.18.000029	Peta potensi investasi provinsi	Dokumen	0
17	2.18.000030	Rencana minat investasi di dalam negeri	Dokumen	0
18	2.18.000032	Unit usaha yang dilakukan pengawasan	Unit Usaha	12.901

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
19	2.18.000034	Unit usaha yang memenuhi komitmen perizinan berusaha	Unit Usaha	59.035
20	2.18.000043	Jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar (Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)) dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah	Dokumen	0

2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
1	2.19.000064	Pemuda kader	Orang	1.192
2	2.19.000065	Pemuda pelopor	Orang	80
3	2.19.000066	Pemuda wirausaha muda	Orang	250
4	2.19.000068	Pemuda berprestasi	Orang	8
5	2.19.000069	Organisasi kepemudaan	Organisasi	1
6	2.19.000071	Organisasi kepemudaan berprestasi	Organisasi	1
7	2.19.000073	Atlet/olahragawan talenta muda	Orang	437
8	2.19.000075	Atlet/olahragawan disabilitas	Orang	815
9	2.19.000076	Kompetisi/kejuaraan olahraga pelajar satuan pendidikan tingkat menengah	Kegiatan	25
10	2.19.000078	Kompetisi/kejuaraan *single event*		33
11	2.19.000079	Kompetisi/kejuaraan *multi event*	Kegiatan	11
12	2.19.000080	Kompetisi/kejuaraan paralimpik	Kegiatan	0
13	2.19.000081	Pelatih olahraga yang bersertifikat	Orang	188
14	2.19.000082	Organisasi olahraga	Lembaga	4
15	2.19.000083	Wasit	Orang	694
16	2.19.000084	Sentra pembinaan olahraga	Lembaga	1
17	2.19.000085	Sarana olahraga	Unit	515
18	2.19.000086	Prasarana olahraga	Unit	169
19	2.19.000087	Sarana olahraga disabilitas	Unit	144
20	2.19.000088	Prasarana olahraga disabilitas	Unit	169
21	2.19.000089	Organisasi kepramukaan	Organisasi	1
22	2.19.000090	Tenaga pendidik pramuka	Orang	180
23	2.19.000091	Kegiatan pramuka	Orang	2

2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
1	2.20.000019	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen	19

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
2	2.20.000020	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi standar data		1
3	2.20.000022	Jumlah statistik sektoral yang telah dilengkapi analisis kebutuhan data dan konfirmasi hasil	Dokumen	272
4	2.20.000023	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Persen	98,91
5	2.20.000024	Jumlah statistik sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari pembina data statistik	Dokumen	67
6	2.20.000025	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	13
7	2.20.000026	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data	Orang	22
8	2.20.000028	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik untuk perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan dan/atau penyusunan kebijakan	Persen	100
9	2.20.000030	Jumlah pembinaan di bidang statistik yang dilakukan oleh walidata terhadap produsen data	Laporan	1
10	2.20.000050	Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan pemerintah daerah	Kegiatan	83
11	2.20.000051	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasil statistik sektoralnya telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi dan/atau data induk	Kegiatan	0
12	2.20.000052	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Persen	0
13	2.20.000053	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya tersedia pada portal data pemerintah daerah	Kegiatan	50
14	2.20.000054	Tingkat kepuasan pengguna data dalam mengakses portal data pemerintah daerah	Persen	0
15	2.20.000055	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	Persen	60

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
16	2.20.000056	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi dokumen perencanaan	Kegiatan	0
17	2.20.000057	Persentase kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi perencanaan kegiatan statistik sektoral	Persen	0
18	2.20.000058	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Persen	92
19	2.20.000059	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Kegiatan	76

2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
1	2.21.000001	Kebijakan tata kelola jaring komunikasi sandi pemerintah daerah yang ditetapkan	Dokumen	1
2	2.21.000002	Kebijakan tata kelola keamanan informasi pemerintah daerah yang ditetapkan	Dokumen	1
3	2.21.000003	Laporan analisis kebutuhan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah provinsi	Laporan	4
4	2.21.000006	Laporan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah provinsi	Laporan	4
5	2.21.000007	Perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	Perangkat Daerah	51

2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
1	2.22.000006	Cagar budaya yang dilakukan pengamanan	Unit	0
2	2.22.000007	Cagar budaya yang dipelihara	Unit	1
3	2.22.000008	Cagar budaya yang dipublikasikan	Unit	0
4	2.22.000009	Cagar budaya yang diselamatkan	Unit	0
5	2.22.000040	Koleksi museum yang dilakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan	Unit	461
6	2.22.000058	Laporan hasil pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)	Laporan	0

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
7	2.22.000063	Laporan hasil penyelenggaraan festival pawongan	Laporan	0
8	2.22.000065	Laporan kegiatan/*event* terkait pengayaan cagar budaya	Laporan	0
9	2.22.000066	Laporan kegiatan/*event* terkait pengembangan cagar budaya	Laporan	0
10	2.22.000092	Lembaga kebudayaan yang dibina	Lembaga	4
11	2.22.000096	Lembaga tradisional yang dibina	Lembaga	0
12	2.22.000100	Maestro/empu yang terfasilitsi pengembangan karyanya	Orang	0
13	2.22.000116	Objek cagar budaya yang diregistrasi	Objek	0
14	2.22.000120	Objek diduga cagar budaya yang diusulkan penetapannya	Objek	0
15	2.22.000122	Objek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan	Objek	0
16	2.22.000123	Objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	Objek	0
17	2.22.000127	Objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi	Objek	101
18	2.22.000143	Orang yang mengakses data dan informasi sejarah	Orang	121.224
19	2.22.000151	Penerima penghargaan terhadap kontribusi dalam pemajuan kebudayaan	Orang	0
20	2.22.000162	Peserta pembinaan sumber daya manusia kebudayaan	Orang	4.730
21	2.22.000170	Pranata kebudayaan yang dibina	Kegiatan	11
22	2.22.000172	Pranata tradisional yang dibina	Kegiatan	4
23	2.22.000174	Prasarana pembinaan sejarah	Unit	12
24	2.22.000177	Sarana pembinaan sejarah	Unit	34.291
25	2.22.000181	Sarana dan prasarana museum yang dipelihara	Unit	3
26	2.22.000183	Sarana dan prasarana museum yang tersedia	Unit	13
27	2.22.000191	Sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal provinsi yang diberdayakan	Orang	0
28	2.22.000194	Sumber daya manusia kesenian tradisional yang mendapatkan sertifikasi	Sertifikat	0
29	2.22.000198	Sumber daya manusia permuseuman yang dibina	Orang	118
30	2.22.000205	Tenaga pelestari cagar budaya yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang	0
31	2.22.000206	Tim ahli cagar budaya	Orang	0
32	2.22.000225	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana taman budaya	Unit	11

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
33	2.22.000234	Penyusunan, pemutakhiran, penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)	Dokumen	1
34	2.22.000236	Pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	Kegiatan	56
35	2.22.000237	Pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	Kegiatan	56
36	2.22.000238	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) kabupaten/kota	Laporan	0
37	2.22.000243	Pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan publik di museum	Orang	1.013.170

2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
1	2.23.000054	Perpustakaan umum kewenangan provinsi	Perpustakaan	1
2	2.23.000055	Perpustakaan khusus kewenangan provinsi	Perpustakaan	302
3	2.23.000056	Jumlah perpustakaan yang terotomasi	Perpustakaan	5
4	2.23.000058	Perpustakaan satuan pendidikan menengah kewenangan provinsi	Perpustakaan	1.071
5	2.23.000059	Perpustakaan satuan pendidikan khusus kewenangan provinsi	Perpustakaan	88
6	2.23.000060	Kunjungan pemustaka pada perpustakaan umum binaan provinsi	Orang	750.965
7	2.23.000061	Kunjungan pemustaka pada perpustakaan khusus binaan provinsi	Orang	0
8	2.23.000062	Kunjungan pemustaka pada perpustakaan satuan pendidikan menengah binaan provinsi	Orang	0
9	2.23.000063	Kunjungan pemustaka pada perpustakaan satuan pendidikan khusus binaan provinsi	Orang	0
10	2.23.000064	Koleksi judul yang dimiliki perpustakaan umum kewenangan provinsi	Judul	21.477
11	2.23.000065	Koleksi judul yang dimiliki perpustakaan khusus kewenangan provinsi	Judul	0
12	2.23.000066	Koleksi judul yang dimiliki perpustakaan satuan pendidikan menengah kewenangan provinsi	Judul	0

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
13	2.23.000067	Koleksi judul yang dimiliki perpustakaan satuan pendidikan khusus kewenangan provinsi	Judul	0
14	2.23.000068	Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) yang diterima oleh perpustakaan milik provinsi	Eksemplar	6.031
15	2.23.000069	Penerbit dan produsen Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR)	Penerbit/Produsen	0
16	2.23.000070	Jumlah koleksi hasil pelaksanaan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) yang diolah	Eksemplar	50.498
17	2.23.000071	Penerbitan katalog induk daerah	*Entry*	50.000
18	2.23.000072	Penerbitan bibliografi daerah	Naskah	1
19	2.23.000074	Koleksi khas daerah yang dimiliki provinsi	Eksemplar	6.036
20	2.23.000076	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang dimiliki	Eksemplar	600
21	2.23.000077	Jumlah promosi gemar membaca tingkat provinsi	Kegiatan	1.167
22	2.23.000078	Tenaga teknis perpustakaan umum binaan provinsi	Orang	648
23	2.23.000079	Tenaga teknis perpustakaan khusus binaan provinsi	Orang	302
24	2.23.000080	Tenaga teknis perpustakaan satuan pendidikan menengah binaan provinsi	Orang	2.142
25	2.23.000081	Tenaga teknis perpustakaan satuan pendidikan khusus binaan provinsi	Orang	176
26	2.23.000082	Pustakawan perpustakaan umum binaan provinsi	Orang	6
27	2.23.000083	Pustakawan perpustakaan khusus binaan provinsi	Orang	302
28	2.23.000084	Pustakawan perpustakaan satuan pendidikan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Orang	1.087
29	2.23.000085	Pustakawan pada perpustakaan satuan pendidikan khusus yang binaan provinsi	Orang	89
30	2.23.000086	Anggota perpustakaan umum binaan provinsi	Orang	236.840
31	2.23.000087	Anggota perpustakaan khusus binaan provinsi	Orang	0
32	2.23.000088	Anggota perpustakaan sekolah menengah binaan provinsi	Orang	0

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
33	2.23.000089	Anggota perpustakaan satuan pendidikan khusus yang menjadi kewenangan provinsi	Orang	0
34	2.23.000090	Siswa sekolah menengah dan khusus yang terlibat dalam promosi gemar membaca tingkat provinsi	Orang	22.039
35	2.23.000091	Masyarakat yang terlibat dalam promosi gemar membaca tingkat provinsi	Orang	1.158.661
36	2.23.000092	Pegiat literasi binaan provinsi	Orang	38

2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
1	2.24.000001	Arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	Arsip	1.722
2	2.24.000002	Arsip yang dilakukan evakuasi, identifikasi, pemulihan dan penyimpanan akibat bencana	Arsip	14.392
3	2.24.000006	Arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun yang dimusnahkan	Berkas	0
4	2.24.000015	Daftar arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip	Arsip	10.194
5	2.24.000028	Layanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah provinsi melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)	Pengguna	16.497
6	2.24.000029	Naskah dinas yang diciptakan dan digunakan	Berkas	0
7	2.24.000031	Naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan	Berkas	20
8	2.24.000036	Basis data arsiparis	Orang	195

3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
1	3.25.000010	Data pengendalian residu	Dokumen	0
2	3.25.000021	Data pengendalian penyakit ikan	Dokumen	0
3	3.25.000062	Dokumen rencana pengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan	Dokumen	0

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
4	3.25.000099	Kapal perikanan yang diawasi dalam kegiatan penangkapan ikan	Unit	0
5	3.25.000105	Kelompok masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang memperoleh pelatihan penguatan dan pengembangan kelembagaan	Kelompok	8
6	3.25.000111	Kelompok pembudidaya ikan di laut dan di kawasan konservasi yang dibina/dipantau	Kelompok	0
7	3.25.000123	Laporan hasil pengujian sampel	Dokumen	0
8	3.25.000129	Luasan kawasan konservasi yang ditetapkan	Hektare	200,02
9	3.25.000130	Luasan wilayah perairan pesisir dan pulau- pulau kecil yang direhabilitasi	Hektare	1,01
10	3.25.000131	Masyarakat yang memperoleh pelatihan dalam pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil	Orang	0
11	3.25.000134	Obat ikan	Unit	0
12	3.25.000151	Pembudidaya ikan di laut dan di kawasan konservasi yang dibina/dipantau	Orang	50
13	3.25.000189	Prasarana pengujian kesehatan ikan dan lingkungan	Unit	0
14	3.25.000226	Sampel yang diuji	Sampel	0
15	3.25.000227	Sarana pengujian kesehatan ikan dan lingkungan	Unit	0
16	3.25.000230	*Speedboat* pengawas	Unit	0
17	3.25.000260	Wadah pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota	Unit	0
18	3.25.000261	Pelabuhan perikanan	Pelabuhan	0
19	3.25.000262	Unit penangkapan ikan	Unit	0
20	3.25.000263	Kapal di wilayah laut sampai dengan 12 mil	Unit	0
21	3.25.000265	Kelompok masyarakat pengawas yang melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha kelautan dan perikanan	Kelompok	15
22	3.25.000269	Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) kawasan konservasi	Unit	0

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
23	3.25.000276	Penggunaan pakan pembudidayaan ikan di laut	Ton	0
24	3.25.000277	Produksi benih ikan laut	Ekor	0
25	3.25.000278	Jumlah produksi bibit rumput laut	Ton	0
26	3.25.000279	Alat dan mesin untuk pembudidayaan ikan di laut	Unit	0
27	3.25.000303	Kasus pelanggaran bidang pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 mil	Perkara	0
28	3.25.000304	Peta rawan pelanggaran usaha bidang pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 mil	Dokumen	0
29	3.25.000320	Lokasi rehabilitasi wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi	Lokasi	0
30	3.25.000321	Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah provinsi	Hektare	0
31	3.25.000322	Alat dan mesin untuk pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar	Unit	0
32	3.25.000325	Data pelanggaran yang terjadi di ruang laut sampai dengan 12 mil	Kasus	0
33	3.25.000326	Kasus pelanggaran perikanan tangkap sampai dengan 12 mil	Kasus	0
34	3.25.000327	Peta rawan pelanggaran perikanan tangkap sampai dengan 12 mil	Dokumen	0
35	3.25.000328	Personel pengawas perikanan	Orang	0
36	3.25.000329	Peta rawan pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Dokumen	0
37	3.25.000333	Pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diawasi pengawas perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya	Pelaku Usaha	0
38	3.25.000334	Kasus pelanggaran perikanan budidaya di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya	Perkara	0

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
39	3.25.000336	Kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 *Gross Tonnage* (GT) yang ditolak	Dokumen	0
40	3.25.000337	Kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 *Gross Tonnage* (GT) yang disetujui	Dokumen	155
41	3.25.000338	Kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 *Gross Tonnage* (GT) yang disetujui dengan catatan	Dokumen	0
42	3.25.000343	Saluran di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota	Meter Lari	0
43	3.25.000344	Sampel pengujian penyakit ikan di laut yang diuji	Sampel	0
44	3.25.000345	Sumber daya manusia penguji kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan di laut	Orang	0
45	3.25.000362	Wadah pembudidayaan ikan di laut	Unit	0
46	3.25.000367	Laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	Unit	0
47	3.25.000378	Pelaku usaha yang diberikan pembinaan terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dan daya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing	Pelaku Usaha	0
48	3.25.000379	Pelaku usaha yang diberikan fasilitas terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dan daya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing	Pelaku Usaha	0
49	3.25.000380	Pelaku usaha yang diberikan pemantauan terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dan daya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka	Pelaku Usaha	0

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
		menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing		
50	3.25.000381	Pelaku usaha yang diberikan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dan daya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing	Pelaku Usaha	0
51	3.25.000382	Pelaku usaha yang mendapat bimbingan dalam penyusunan prosedur dan penerapan persyaratan terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan, dan daya saing serta pemberdayaan usaha bagi pelaku usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing	Pelaku Usaha	0
52	3.25.000383	Pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan fasilitasi dalam penyusunan dokumen, validasi, dan penerapan sistem mutu terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan, dan daya saing serta pemberdayaan usaha bagi pelaku usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing	Pelaku Usaha	0
53	3.25.000392	Hari operasi kapal pengawas kelautan dan perikanan	Hari Operasi	48
54	3.25.000395	Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan	Pelaku Usaha	0
55	3.25.000415	Dokumen pertimbangan teknis pengelolaan perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan	Dokumen	5
56	3.25.000416	Pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan	Pelaku Usaha	0
57	3.25.000419	Lokasi pembudidayaan ikan yang diawasi	Lokasi	0
58	3.25.000420	Pelaku usaha pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 mil	Pelaku Usaha	0

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
59	3.25.000421	Kasus pelanggaran usaha pengolahan dan/atau usaha pemasaran hasil perikanan	Perkara	0
60	3.25.000422	Lokasi pembudidayaan ikan yang diawasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya	Lokasi	0
61	3.25.000440	Pelaku usaha pengolahan dan/atau pemasaran hasil perikanan sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	100
62	3.25.004140	Rekomendasi izin tanda daftar kapal berukuran sampai dengan 5 *Gross Tonnage* (GT) yang diterbitkan	Dokumen	0
63	3.25.004141	Permohonan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 *Gross Tonnage* (GT) yang diproses	Dokumen	0
64	3.25.004142	Unit Pelaksana Teknis (UPT) pengelola	Unit	0
65	3.25.004143	Penyediaan fasilitas pokok	Unit	0
66	3.25.004145	Penyedian fasilitas penunjang	Unit	5
67	3.25.004169	*Monitoring* kesehatan ikan dan lingkungan yang sekurang-kurangnya memuat data terkait pengendalian penyakit ikan, pengendalian pakan dan obat ikan, pengendalian residu, pengendalian resistensi antimikroba, pengendalian lingkungan budidaya, rehabilitasi lingkungan budidaya, dan/atau penyelenggaraan kesejahteraan ikan *(aquatic animal welfare)* di laut dan lintas daerah kabupaten/kota	Dokumen	0
68	3.25.004170	Gugus tugas tanggap darurat penyakit ikan tingkat provinsi	Kelompok	0

3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
1	3.26.000024	Dokumen hasil pelaksanaan penyebaran informasi pariwisata provinsi dalam negeri	Dokumen	1

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
2	3.26.000025	Dokumen hasil pelaksanaan penyebaran informasi pariwisata provinsi luar negeri	Dokumen	1
3	3.26.000028	Dokumen hasil pelaksanaan penyediaan data pariwisata provinsi dalam negeri	Dokumen	2
4	3.26.000033	Dokumen hasil penguatan promosi melalui media elektronik dalam negeri	Dokumen	1
5	3.26.000034	Dokumen hasil penguatan promosi melalui media elektronik luar negeri	Dokumen	1
6	3.26.000035	Dokumen hasil penguatan promosi melalui media lainnya dalam negeri	Dokumen	1
7	3.26.000043	Dokumen perancangan pengembangan daya tarik wisata unggulan provinsi	Dokumen	3
8	3.26.000045	Dokumen perencanaan destinasi pariwisata provinsi	Dokumen	3
9	3.26.000047	Dokumen perencanaan pengembangan daya tarik wisata unggulan provinsi	Dokumen	1
10	3.26.000050	Dokumen rekomendasi peningkatan pengembangan daya tarik wisata unggulan provinsi	Dokumen	3
11	3.26.000064	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengembangan jaringan orang kreatif	Laporan	15
12	3.26.000071	Laporan hasil pelaksanaan perluasan akses pasar produk kreatif pasar ekspor	Laporan	2
13	3.26.000073	Laporan hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata provinsi	Laporan	4
14	3.26.000115	Pengunjung objek daya tarik wisata provinsi	Orang	29.800.234
15	3.26.000121	Retribusi pariwisata yang dikelola provinsi	Rupiah	17.139.277.250
16	3.26.000142	Unit usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang memperoleh sertifikasi	Unit Usaha	384
17	3.26.000168	Laporan hasil kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri	Laporan	9
18	3.26.000173	Lokasi pembangunan peningkatan kualitas pada daya tarik wisata unggulan provinsi	Lokasi	15

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
		yang berbasis alam/budaya/buatan manusia		
19	3.26.000179	Daya tarik wisata unggulan provinsi yang ditetapkan	Lokasi	5
20	3.26.000181	Sarana dan prasarana yang dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di destinasi pariwisata	Unit	6
21	3.26.000183	Sarana dan prasarana yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi di destinasi pariwisata provinsi	Unit	35
22	3.26.000186	Orang yang mengikuti peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif	Orang	200
23	3.26.000192	Data infrastruktur ruang kreatif		3
24	3.26.000195	Standar kegiatan usaha pariwisata berbasis risiko	Kegiatan Usaha	2.956
25	3.26.000200	Sarana dan prasarana yang dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di destinasi pariwisata provinsi yang terpelihara	Unit	6
26	3.26.000203	Sarana dan prasarana yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi di kawasan strategis pariwisata provinsi	Unit	4
27	3.26.000215	Data jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi setelah difasilitasi sertifikasi kompetensi profesi subsektor ekonomi kreatif	Orang	102
28	3.26.000216	Data kegiatan fasilitasi sertifikasi kompetensi profesi subsektor ekonomi kreatif yang telah dilakukan	Laporan	3
29	3.26.000229	Data Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi ekonomi kreatif setelah difasilitasi pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif	Orang	886
30	3.26.000230	Data kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif yang telah dilaksanakan	Orang	886
31	3.26.000232	Data tenaga kerja pariwisata yang tersertifikasi	Orang	700
32	3.26.000233	Data kegiatan fasilitasi sertifikasi yang telah dilaksanakan	Orang	700

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
33	3.26.000247	Data Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata yang memiliki kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang pariwisata setelah difasilitasi pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	Orang	700
34	3.26.000248	Kegiatan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang telah dilaksanakan	Orang	700
35	3.26.000249	Data Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi setelah mengikuti fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	Orang	100
36	3.26.000250	Data pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	Orang	102
37	3.26.000292	Produk yang memperoleh pelindungan hak kekayaan intelektual	Produk	247

3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
1	3.27.000021	Bimbingan peningkatan produksi benih/bibit ternak kewenangan provinsi	Laporan	0
2	3.27.000026	Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Dokumen	12
3	3.27.000229	Unit usaha produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis sertifikasi nomor kontrol veteriner	Unit	0
4	3.27.000248	Jumlah benih bersertifikat hortikultura berbentuk batang yang diawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan	Batang	0
5	3.27.000249	Jumlah benih bersertifikat hortikultura berbentuk batang yang diawasi peredarannya	Batang	0

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
6	3.27.000250	Jumlah benih bersertifikat hortikultura berbentuk batang yang tersedia	Batang	0
7	3.27.000251	Jumlah benih bersertifikat hortikultura berbentuk umbi yang diawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan	Ton	0
8	3.27.000252	Jumlah benih bersertifikat hortikultura berbentuk umbi yang diawasi peredarannya	Ton	0
9	3.27.000253	Jumlah benih bersertifikat hortikultura berbentuk umbi yang tersedia	Ton	0
10	3.27.000254	Jumlah benih bersertifikat perkebunan yang diawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan	Batang	0
11	3.27.000255	Jumlah benih bersertifikat perkebunan yang diawasi peredarannya	Batang	0
12	3.27.000256	Jumlah benih bersertifikat perkebunan yang tersedia	Batang	0
13	3.27.000258	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang diawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan	Ton	0
14	3.27.000261	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) yang diawasi peredarannya	Setek	0
15	3.27.000262	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) yang tersedia	Setek	0
16	3.27.000263	Jumlah benih hortikultura berbentuk batang yang diperbanyak/diproduksi	Batang	0
17	3.27.000283	Jumlah bimbingan peningkatan pakan kewenangan provinsi	Dokumen	0
18	3.27.000284	Jumlah bimbingan peningkatan produksi bahan pakan kewenangan provinsi	Dokumen	0
19	3.27.000285	Jumlah bimbingan peningkatan produksi benih/bibit ternak kewenangan provinsi	Dokumen	1

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
20	3.27.000286	Jumlah bimbingan peningkatan produksi tanaman pakan ternak kewenangan provinsi	Dokumen	0
21	3.27.000287	Jumlah daerah terdampak wabah yang terkendali	Wilayah	0
22	3.27.000300	Jumlah *existing* laboratorium kesehatan hewan (keswan) dan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet)	Unit	0
23	3.27.000307	Jumlah *existing* penyuluh pertanian Aparatur Sipil Negara (ASN)	Orang	36
24	3.27.000310	Jumlah *existing* prasarana hortikultura lainnya	Unit	0
25	3.27.000311	Jumlah *existing* prasarana perkebunan lainnya	Unit	0
26	3.27.000312	Jumlah *existing* prasarana peternakan lainnya	Unit	0
27	3.27.000313	Jumlah *existing* prasarana tanaman pangan lainnya	Unit	0
28	3.27.000316	Jumlah *existing* rumah sakit hewan, klinik hewan, ambulatori, praktek dokter hewan mandiri/puskeswan mandiri, atau tempat pelayanan paramedik veteriner kesehatan hewan (keswan) yang terbangun	Unit	0
29	3.27.000327	Jumlah *existing* rumah potong hewan	Unit	0
30	3.27.000335	Jumlah hasil pengujian di laboratorium kesehatan hewan	Laporan	0
31	3.27.000369	Jumlah kebutuhan benih	Ton	0
32	3.27.000376	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	Laporan	0
33	3.27.000384	Jumlah kelompok petani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan	Kelompok	48
34	3.27.000385	Jumlah ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan)	Unit	0
35	3.27.000398	Jumlah ketersediaan pestisida	Liter	0
36	3.27.000399	Jumlah ketersediaan pupuk	Ton	0
37	3.27.000400	Jumlah ketersediaan sarana pendukung pertanian	Unit	0
38	3.27.000403	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi peredaran sarana pertanian	Kegiatan	0

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
39	3.27.000433	Jumlah luas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) hortikultura	Hektare	55
40	3.27.000434	Jumlah luas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) hortikultura yang ditangani	Hektare	55
41	3.27.000435	Jumlah luas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) perkebunan	Hektare	0
42	3.27.000436	Jumlah luas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) perkebunan yang ditangani	Hektare	0
43	3.27.000437	Jumlah luas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan	Hektare	55
44	3.27.000438	Jumlah luas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan yang ditangani	Hektare	55
45	3.27.000441	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	Orang	0
46	3.27.000450	Jumlah pembangunan pemeliharaan laboratorium kesehatan hewan (keswan) dan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet)	Unit	0
47	3.27.000452	Jumlah pemeliharaan laboratorium kesehatan hewan (keswan) dan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet)	Unit	0
48	3.27.000470	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan	Laporan	6
49	3.27.000471	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran media pembawa penyakit hewan lainnya	Laporan	6
50	3.27.000472	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran produk hewan	Laporan	6
51	3.27.000500	Jumlah penyuluh pertanian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan	Orang	36

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
52	3.27.000501	Jumlah penyuluh pertanian swadaya dan swasta yang telah mengikuti pengembangan kompetensi	Orang	0
53	3.27.000502	Jumlah peralatan laboratorium kesehatan hewan (keswan) dan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet)	Unit	0
54	3.27.000504	Jumlah perbanyakan/produksi benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain)	Ton	0
55	3.27.000509	Jumlah petugas teknis kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	Orang	0
56	3.27.000510	Jumlah petugas teknis kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	Orang	0
57	3.27.000520	Jumlah prasarana hortikultura lainnya yang dibangun	Unit	0
58	3.27.000521	Jumlah prasarana hortikultura lainnya yang direhabilitasi	Unit	0
59	3.27.000522	Jumlah prasarana hortikultura lainnya yang terpelihara	Unit	0
60	3.27.000535	Jumlah prasarana perkebunan lainnya yang dibangun	Unit	0
61	3.27.000536	Jumlah prasarana perkebunan lainnya yang direhabilitasi	Unit	0
62	3.27.000538	Jumlah prasarana peternakan lainnya yang dibangun	Unit	0
63	3.27.000539	Jumlah prasarana peternakan lainnya yang direhabilitasi	Unit	0
64	3.27.000541	Jumlah prasarana tanaman pangan lainnya yang dibangun	Unit	0
65	3.27.000542	Jumlah prasarana tanaman pangan lainnya yang direhabilitasi	Unit	0
66	3.27.000553	Jumlah rehabilitasi pemeliharaan laboratorium kesehatan hewan (keswan) dan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet)	Unit	0
67	3.27.000564	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun	Unit	0

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
68	3.27.000565	Jumlah rumah potong hewan yang direhabilitasi	Unit	0
69	3.27.000567	Jumlah rumah sakit hewan, klinik hewan, ambulatori, praktek dokter hewan mandiri/puskeswan mandiri, atau tempat pelayanan paramedik veteriner keswan yang dibangun	Unit	0
70	3.27.000568	Jumlah rumah sakit hewan, klinik hewan, ambulatori, praktek dokter hewan mandiri/puskeswan mandiri, atau tempat pelayanan paramedik veteriner keswan yang direhabilitasi	Unit	0
71	3.27.000583	Jumlah sebaran alat dan mesin pertanian (alsintan)	Unit	0
72	3.27.000584	Jumlah sebaran pestisida	Liter	0
73	3.27.000585	Jumlah sebaran pupuk	Ton	0
74	3.27.000586	Jumlah sebaran sarana pendukung pertanian	Unit	0
75	3.27.000611	Luas kawasan hortikultura	Hektare	0
76	3.27.000612	Luas kawasan perkebunan	Hektare	0
77	3.27.000613	Luas kawasan peternakan	Hektare	0
78	3.27.000614	Luas kawasan tanaman pangan	Hektare	0
79	3.27.000651	Jumlah pupuk baik pupuk subsidi dan pupuk nonsubsidi yang tersebar atau dimiliki oleh masing-masing masyarakat petani untuk digunakan atau dimanfaatkan pada lahan garapannya	Ton	0
80	3.27.000656	Jumlah sebaran kondisi alat dan mesin pertanian (alsintan) baik dan rusak	Unit	0
81	3.27.000659	Jumlah ketersediaan benih hortikultura (berbentuk batang, biji maupun umbi)	Ton	0
82	3.27.000668	Jumlah benih bersertifikat hortikultura (berbentuk batang, biji, maupun umbi) yang diawasi peredarannya	Ton	0

3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
1	3.28.000001	Bangunan sipil teknis yang terbangun, data luas lahan kritis di luar kawasan hutan	Unit	0
2	3.28.000003	Data luas area ekosistem yang dipulihkan, masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemulihan ekosistem, serta laporan kegiatan	Hektare	1
3	3.28.000004	Data luas area kawasan hutan, kegiatan patroli pencegahan kerusakan hutan, kegiatan patroli pembatasan kerusakan hutan, personel polisi hutan	Data	207,29
4	3.28.000005	Data luas area mangrove yang dilaksanakan rehabilitasi, bibit mangrove yang disiapkan, data luas lahan kritis di luar kawasan hutan	Hektare	0
5	3.28.000006	Data luas area penerapan pengembangan teknologi rehabilitasi hutan dan lahan, data luas lahan kritis di luar kawasan hutan	Hektare	0
6	3.28.000007	Data luas area perbenihan untuk rehabilitasi lahan, data luas lahan kritis di luar kawasan hutan	Hektare	0
7	3.28.000008	Data luas hutan area patroli, kegiatan patroli pencegahan kerusakan hutan, kegiatan patroli pembatasan kerusakan hutan, personel polisi hutan	Data	12
8	3.28.000009	Data luas hutan kota yang dibangun di luar kawasan hutan negara, data luas lahan kritis di luar kawasan hutan	Hektare	60,44
9	3.28.000010	Data luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara, data luas lahan kritis diluar kawasan hutan	Hektare	0
10	3.28.000012	Data luas kawasan yang dipersiapkan untuk perhutanan sosial	Hektare	0
11	3.28.000013	Data luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara, data luas lahan kritis di luar kawasan hutan	Hektare	4
12	3.28.000015	Dokumen analisis dalam rangka pemberian pertimbangan teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan	Dokumen	0

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
		Hutan (PBPH), data luas hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung dalam satu provinsi		
13	3.28.000016	Dokumen data dan informasi mengenai pemanfaatan hutan di kawasan hutan lindung provinsi, data luas hutan di kawasan hutan lindung dalam satu provinsi	Dokumen	0
14	3.28.000017	Dokumen data dan informasi terkait luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di kawasan hutan produksi dalam 1 (satu) provinsi, data luas hutan di kawasan hutan produksi dalam satu provinsi	Dokumen	0
15	3.28.000018	Dokumen hasil koordinasi sinkronisasi pembinaan, pengendalian, dan pengawasan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di kawasan hutan lindung, data luas hutan di kawasan hutan lindung dalam satu provinsi	Dokumen	0
16	3.28.000019	Dokumen hasil koordinasi sinkronisasi pembinaan, pengendalian, dan pengawasan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di kawasan hutan produksi, data luas hutan di kawasan hutan produksi dalam satu provinsi	Dokumen	0
17	3.28.000021	Dokumen kegiatan pengawasan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)	Dokumen	0
18	3.28.000022	Dokumen koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan untuk wilayah provinsi, data luas ruang kehutanan	Dokumen	0
19	3.28.000023	Dokumen laporan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), pembinaan Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam kegiatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), sosialisasi pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang terakses pemberdayaan	Dokumen	4

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
20	3.28.000025	Dokumen model pengelolaan konservasi berbasis kearifan lokal, dokumen fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) tersusun, tersusunnya penyusunan dan penetapan rencanan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Dokumen	1
21	3.28.000026	Dokumen paket rekomendasi atas terpenuhinya hak dan kewajiban pemangku pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), dokumen terlaksananya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), Surat Keputusan (SK) dan forum Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ditetapkan, pemantauan dan evaluasi kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) lahan kritis	Dokumen	7
22	3.28.000027	Dokumen pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan, data luas kawasan hutan dalam satu provinsi	Dokumen	0
23	3.28.000028	Dokumen pemanfaatan hutan di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Dokumen	0
24	3.28.000030	Dokumen perencanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi	Unit	0
25	3.28.000032	Dokumen permohonan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) kayu skala kecil dan menengah yang dilayani, laporan kegiatan fasilitasi sosialisasi, konsultasi dan pendampingan pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) untuk Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) kayu skala kecil dan menengah	Dokumen	0
26	3.28.000035	Dokumen rencana kerja tahunan pemanfaatan hutan lindung, data luas hutan di kawasan hutan lindung dalam satu provinsi	Dokumen	0
27	3.28.000036	Dokumen rencana kerja tahunan pemanfaatan hutan produksi, data luas hutan di kawasan	Dokumen	0

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
		hutan produksi dalam satu provinsi		
28	3.28.000037	Dokumen rencana pemanfaatan ekosistem karst	Kasus	0
29	3.28.000039	Dokumen rencana pengelolaan jangka panjang Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), laporan kegiatan fasilitasi rencana pengelolaan jangka panjang Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK), dokumen pengelolaan tempat ibadah dan wisata religi di kawasan hutan	Dokumen	0
30	3.28.000040	Dokumen rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan, unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Dokumen	0
31	3.28.000045	Kegiatan pemanfaatan Taman Hutan Raya (Tahura), masyarakat yang mengikuti kegiatan. laporan kegiatan	Permohonan	0
32	3.28.000046	Kegiatan penanganan kerusakan lahan basah, luas area lahan basah yang tertangani kerusakannya, personel pelaksana penanganan kerusakan lahan basah	Kasus	0
33	3.28.000047	Kegiatan pencegahan kerusakan hasil hutan, kegiatan pembatasan kerusakan hasil hutan, klasifikasi hasil hutan	Kasus	0
34	3.28.000048	Kegiatan pencegahan penanggulangan dan pembatasan kerusakan kawasan Taman Hutan Raya (Tahura), luas area kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) yang telah ditangani, dokumen hasil kegiatan	Kegiatan	0
35	3.28.000051	Kegiatan pengelolaan daerah penyangga di kawasan bernilai ekosistem penting, luas wilayah daerah penyangga di kawasan bernilai ekosistem penting yang telah dikelola, laporan kegiatan	Kasus	0
36	3.28.000052	Kegiatan pengelolaan daerah penyangga Taman Hutan Raya (Tahura) provinsi, luas wilayah daerah penyangga yang telah dikelola, dokumen laporan pelaksanaan kegiatan	Kegiatan	0

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
		pengelolaan daerah penyangga Taman Hutan Raya (Tahura)		
37	3.28.000053	Kegiatan pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya, dokumen penetapan koridor hidupan liar	Kasus	27
38	3.28.000054	Kegiatan pengendalian kerusakan ekosistem karst, luas area ekosistem yang telah terkendali	Kasus	0
39	3.28.000055	Kelompok tani hutan, data luas perhutanan sosial dalam satu provinsi	Kelompok	18
40	3.28.000056	Kerja sama Taman Hutan Raya (Tahura), laporan kegiatan kerjasama, data luas kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) provinsi	Dokumen	0
41	3.28.000057	Laporan inventarisasi tumbuhan dan satwa, laporan data *ground check*	Kasus	0
42	3.28.000058	Laporan kegiatan fasilitasi sosialisasi, konsultasi dan pendampingan pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan untuk Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (PBPHHBK) skala kecil dan menengah, izin Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) bukan kayu skala kecil dan menengah	Laporan	0
43	3.28.000060	Laporan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan, laporan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan, sarana dan prasarana pendukung dalam penanganan, penanggulangan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, data konflik tenurial kawasan hutan di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Kasus	0
44	3.28.000062	Laporan pertemuan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan perlindungan hutan, sarana dan prasarana pendukung dalam pengamanan dan perlindungan hutan, data konflik tenurial kawasan hutan di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Kasus	0

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
45	3.28.000063	Masyarakat desa yang berpartisipasi, jenis kegiatan usaha ekonomi produktif, pendamping, kelompok, produk yang dihasilkan	Kasus	0
46	3.28.000068	Personel polisi hutan, kendaraan operasional, senjata pengamanan, laporan kegiatan pengendalian dan pengawasan Tumbuhan Satwa Liar (TSL), kegiatan pengendalian dan pengawasan Tumbuhan Satwa Liar (TSL)	Laporan	9
47	3.28.000069	Personel polisi hutan, kendaraan, peralatan pengamanan, kegiatan pengawasan	Personel	0
48	3.28.000070	Peta blok pengelolaan dan penataan wilayah kerja dari Taman Hutan Raya (Tahura), data luas kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) provinsi	Dokumen	0
49	3.28.000071	Rancang bangun tata hutan wilayah kesatuan pengelolaan hutan yang disusun, unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Dokumen	0
50	3.28.000072	Sarana prasarana operasionalisasi resor dan kantor resor kesatuan pengelolaan hutan yang terbangun, laporan operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Unit	0
51	3.28.000076	Terbentuknya kelembagaan pengelolaan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) pada tingkat tapak/forum Daerah Aliran Sungai (DAS), laporan fasilitasi forum Daerah Aliran Sungai (DAS)	Lembaga	2
52	3.28.000077	Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang telah dilakukan pembagian blok, dan dokumen pembagian blok/petak pengelolaan hutan pada wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) terkait dengan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)	Unit	0

3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
1	3.29.000001	Data Standar Operasional Prosedur (SOP) izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri	Dokumen	1
2	3.29.000002	Data izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi yang ditetapkan	Izin	224
3	3.29.000006	Data perusahaan penyediaan tenaga listrik non-badan usaha milik negara yang berizin	Perusahaan	651
4	3.29.000007	Data rekomendasi perizinan usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri	Rekomendasi	122
5	3.29.000008	Data cekungan air tanah dalam daerah provinsi	Unit	0
6	3.29.000009	Data *existing* pembangkit listrik (Energi Baru Terbarukan (EBT) dan fosil)	Unit	651
7	3.29.000011	Data infrastruktur pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik yang belum berkembang, daerah terpencil dan pedesaan	Unit	6
8	3.29.000021	Data penyimpangan pelaksanaan perizinan usaha penyediaan tenaga listrik non-badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam daerah provinsi	Kasus	0
9	3.29.000022	Data penyimpangan pemanfaatan zona konservasi air tanah	Kasus	0
10	3.29.000023	Data perusahaan yang melaksanakan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri	Perusahaan	122
11	3.29.000024	Data perusahaan yang memiliki izin operasi yang masih berlaku	Perusahaan	377
12	3.29.000026	Data realisasi anggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu	Dokumen	0

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
13	3.29.000027	Data realisasi pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik yang belum berkembang, daerah terpencil dan pedesaan	Unit	6
14	3.29.000031	Data rekomendasi perizinan usaha penyediaan tenaga listrik non-badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam daerah provinsi	Rekomendasi	179
15	3.29.000036	Data sumber pembangkit listrik yang direncanakan	Titik	35
16	3.29.000038	Data wilayah yang belum teraliri listrik	Dokumen	0
17	3.29.000039	Data zona konservasi air tanah	Zona	21
18	3.29.000043	Pembangkit listrik tenaga surya	Unit	22

3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
1	3.30.000004	Barang beredar yang diawasi	Barang	154
2	3.30.000005	Barang kebutuhan pokok yang tersedia di tingkat distributor	Barang	45
3	3.30.000006	Barang kebutuhan pokok yang tersedia di tingkat distributor dan sub distributor	Barang	45
4	3.30.000007	Barang kebutuhan pokok yang tersedia di tingkat sub distributor	Barang	45
5	3.30.000008	Barang yang telah diuji	Barang	6.031
6	3.30.000009	Data dan informasi sistem dan jaringan informasi perdagangan	Dokumen	2
7	3.30.000012	Dokumen laporan sarana dan prasarana pusat distribusi provinsi	Dokumen	1
8	3.30.000013	Dokumen laporan sarana dan prasarana pusat distribusi regional	Dokumen	1
9	3.30.000016	Jasa yang diawasi	Jasa	0
10	3.30.000018	Kegiatan distribusi yang telah diperiksa	Kegiatan	32
11	3.30.000027	Kegiatan perdagangan yang diawasi	Kegiatan	190
12	3.30.000028	Kegiatan sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Kegiatan	16

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
13	3.30.000030	Laporan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang aktif	Laporan	27
14	3.30.000031	Laporan kasus yang ditangani	Laporan	27
15	3.30.000033	Laporan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang aktif	Laporan	0
16	3.30.000034	Laporan orang yang mengikuti pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri	Laporan	1
17	3.30.000035	Laporan pelaku usaha ekspor yang telah dibina	Laporan	1
18	3.30.000036	Laporan pelaku usaha yang berorientasi ekspor pada pameran dagang lokal	Laporan	1
19	3.30.000037	Laporan pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan	Laporan	1
20	3.30.000038	Laporan pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	Laporan	1
21	3.30.000039	Laporan pengaduan konsumen yang ditangani	Laporan	27
22	3.30.000041	Laporan produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi	Laporan	1
23	3.30.000042	Laporan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang melakukan pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui kemitraan dengan ritel, lokapasar, perhotelan dan jasa akomodasi	Laporan	1
24	3.30.000043	Laporan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang melakukan pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui kepesertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	Laporan	1
25	3.30.000059	Pelaksanaan operasi pasar yang dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya	Kegiatan	10

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
		beberapa kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi		
26	3.30.000072	Pelaku usaha yang telah terfasilitasi perizinan berusaha secara elektronik	Pelaku Usaha	385
27	3.30.000093	Penggunaan produk dalam negeri oleh masyarakat yang melibatkan *stakeholder*, tokoh masyarakat, atau *influencer*	Produk	0
28	3.30.000095	Produk yang telah diterbitkan sertifikasinya	Produk	580
29	3.30.000100	Pusat distribusi provinsi yang telah terlaksana	Unit	2
30	3.30.000101	Pusat distribusi regional yang telah terlaksana	Unit	142
31	3.30.000105	Surat keterangan asal yang telah dilaporkan untuk diterbitkan	SKA	72.673

3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
1	3.31.000005	Hasil pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK)	Laporan	0
2	3.31.000028	Peninjauan kembali rencana pembangunan industri provinsi setiap 5 tahun	Dokumen	0
3	3.31.000035	Rekomendasi teknis atas draf rencana pembangunan industri kabupaten/kota	Dokumen	0
4	3.31.000039	Data infrastruktur transportasi, infrastruktur listrik dan energi, infrastruktur pengelolaan air baku, infrastruktur pengelolaan air limbah, sarana pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) industri, kawasan industri, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota	Data	2
5	3.31.000040	Data infrastruktur transportasi, infrastruktur listrik dan energi, infrastruktur pengelolaan air baku, infrastruktur pengelolaan air limbah, sarana pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) industri, kawasan industri, dan Rencana	Data	2

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
		Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi		
6	3.31.000041	Data jumlah objek pengawasan jaminan produk halal di kabupaten/kota	Data	339
7	3.31.000042	Data jumlah objek pengawasan jaminan produk halal di provinsi	Data	339
8	3.31.000045	Data perizinan berusaha yang dimiliki perusahaan industri di provinsi	Data	39.772
9	3.31.000046	Data persyaratan/standar kegiatan usaha berdasarkan bidang industri, skala usaha, dan tingkat risiko di provinsi	Data	39.772
10	3.31.000047	Data perusahaan industri di kabupaten/kota berdasarkan jumlah investasi	Data	39.772
11	3.31.000048	Data perusahaan industri di kabupaten/kota berdasarkan sektor dan subsektor, satuan perusahaan	Data	39.772
12	3.31.000049	Data perusahaan industri di kabupaten/kota berdasarkan skala usaha, satuan perusahaan	Data	39.772
13	3.31.000050	Data perusahaan industri di kabupaten/kota berdasarkan tingkat risiko, satuan perusahaan	Data	39.772
14	3.31.000052	Data perusahaan industri di kabupaten/kota penerima fasilitas	Data	2
15	3.31.000053	Data perusahaan industri di kabupaten/kota telah operasional	Data	39.772
16	3.31.000054	Data perusahaan industri di provinsi berdasarkan jumlah investasi	Data	39.772
17	3.31.000055	Data perusahaan industri di provinsi berdasarkan sektor dan subsektor, satuan perusahaan	Data	39.772
18	3.31.000056	Data perusahaan industri di provinsi berdasarkan skala usaha, satuan perusahaan	Data	39.772
19	3.31.000057	Data perusahaan industri di provinsi berdasarkan tingkat risiko, satuan perusahaan	Data	39.772
20	3.31.000058	Data perusahaan industri di provinsi dalam tahap pembangunan	Data	0

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
21	3.31.000059	Data perusahaan industri di provinsi penerima fasilitas	Data	2
22	3.31.000060	Data perusahaan industri di provinsi telah operasional	Data	39.772
23	3.31.000061	Jumlah permintaan verifikasi teknis pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian di provinsi	Data	62
24	3.31.000062	Jumlah permintaan verifikasi teknis pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian di kabupaten/kota	Data	62
25	3.31.000063	Peraturan daerah rencana pembangunan industri kabupaten/kota	Dokumen	0

3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
1	3.32.000001	Calon lokasi yang sudah dilakukan penjajakan	Lokasi	2
2	3.32.000002	Calon transmigran terdaftar dan terseleksi	Kepala Keluarga	5
3	3.32.000003	Calon transmigran atau transmigran yang mampu implementasi hasil pelatihan	Orang	5
4	3.32.000004	Calon transmigrasi atau transmigrasi yang mampu implementasi hasil penyuluhan	Kepala Keluarga	156
5	3.32.000005	Calon transmigrasi yang mendapat penyuluhan	Kepala Keluarga	156
6	3.32.000006	Calon transmigran atau transmigran yang mendapat pelatihan	Orang	5
7	3.32.000008	Data kartu keluarga asal dan tujuan	Kepala Keluarga	5
8	3.32.000012	Data kartu keluarga yang ikut pelatihan	Orang	5
9	3.32.000013	Data kartu keluarga yang ikut penyuluhan	Kepala Keluarga	156
10	3.32.000019	Jenis materi pelatihan	Materi	1
11	3.32.000020	Jenis materi penyuluhan	Materi	1
12	3.32.000027	Data jumlah kerja sama antarprovinsi, provinsi dengan kabupaten/kota, serta antarkabupaten/kota	Laporan/ Dokumen	4

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
13	3.32.000030	Kepala keluarga yang berminat mengikuti program transmigrasi (animo)	Kepala Keluarga	156
14	3.32.000031	Jumlah kepala keluarga yang ditempatkan	Orang	5
15	3.32.000032	Kepala keluarga yang ikut pelatihan	Kepala Keluarga	5
16	3.32.000033	Jumlah kepala keluarga yang ikut penyuluhan	Kepala Keluarga	156
17	3.32.000034	Jumlah calon transmigrasi yang mampu mengimplementasikan hasil pelatihan	Orang	5
18	3.32.000039	Laporan hasil koordinasi kerja sama	Laporan	2
19	3.32.000040	Laporan hasil sinkronisasi kerja sama	Laporan	2
20	3.32.000043	Lokasi penempatan	Lokasi	2
21	3.32.000045	Lokasi yang telah dilaksanakan pemantauan dan evaluasi	Lokasi	2
22	3.32.000052	Transmigran yang diberangkatkan	Kepala Keluarga	5
23	3.32.000053	Transmigran yang ditampung	Kepala Keluarga	5
24	3.32.000054	Transmigran yang memperoleh pelayanan kesehatan	Kepala Keluarga	5
25	3.32.000055	Transmigran yang mendapatkan pendampingan	Kepala Keluarga	5
26	3.32.000056	Transmigran yang mengikuti penyuluhan sebelum keberangkatan	Orang	156
27	3.32.000057	Transmigran yang telah diberikan bantuan nonstandar	Paket	1
28	3.32.000058	Transmigran yang telah diberikan bantuan permodalan	Paket	1
29	3.32.000059	Transmigran yang terseleksi akhir pra pemberangkatan	Kepala Keluarga	5

4.01 - SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
1	4.01.000001	Dokumen hasil penataan kelembagaan kabupaten/kota	Dokumen	10
2	4.01.000003	Dokumen hasil pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan	Dokumen	3
3	4.01.000004	Dokumen hasil pelaksanaan reformasi birokrasi	Dokumen	2

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
4	4.01.000005	Dokumen hasil pemantauan dan evaluasi akuntabilitas kinerja	Dokumen	2
5	4.01.000006	Laporan hasil evaluasi pelaksanaan budaya kerja	Laporan	2
6	4.01.000007	Dokumen hasil pengelolaan tata laksana pemerintahan	Dokumen	3
7	4.01.000008	Dokumen hasil fasilitasi peningkatan pelayanan publik	Dokumen	4
8	4.01.000009	Dokumen hasil pengelolaan administrasi kebijakan pemerintahan	Dokumen	5
9	4.01.000010	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan pemerintahan umum	Dokumen	180
10	4.01.000011	Dokumen hasil fasilitasi penataan wilayah	Dokumen	3
11	4.01.000013	Dokumen hasil pengembangan otonomi dan penataan urusan yang dilaksanakan	Dokumen	5
12	4.01.000014	Laporan hasil evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Laporan	1
13	4.01.000015	Kerja sama antarpemerintah yang difasilitasi	Dokumen	3
14	4.01.000019	Lembaga bina spiritual yang difasilitasi	Lembaga	11
15	4.01.000020	Dokumen hasil fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan	Dokumen	92,85
16	4.01.000021	Dokumen hasil fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesehatan	Dokumen	24
17	4.01.000022	Dokumen hasil fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang sosial	Dokumen	12
18	4.01.000023	Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata	Dokumen	5

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
19	4.01.000024	Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja	Dokumen	8
20	4.01.000026	Produk hukum pengaturan yang disusun	Dokumen	100
21	4.01.000027	Produk hukum penetapan yang disusun	Dokumen	1.500
22	4.01.000028	Produk hukum yang didokumentasi dan dikelola informasi hukumnya	Dokumen	250
23	4.01.000030	Masalah hukum yang diselesaikan	Kasus	40
24	4.01.000031	Masalah nonlitigasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diselesaikan	Kasus	48
25	4.01.000032	Dokumen hasil pengelolaan kebijakan ekonomi makro	Dokumen	2
26	4.01.000037	Dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pengelolaan badan usaha milik daerah jasa keuangan dan aneka usaha	Dokumen	12
27	4.01.000040	Dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Dokumen	2
28	4.01.000041	Dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Dokumen	10
29	4.01.000042	Laporan hasil strategi pengadaan barang dan jasa	Laporan	0
30	4.01.000043	Laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	Laporan	12
31	4.01.000044	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa	Laporan	0
32	4.01.000045	Laporan pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik	Laporan	6

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
33	4.01.000046	Laporan pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa	Laporan	2
34	4.01.000047	Laporan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa	Laporan	6
35	4.01.000048	Orang yang mengikuti pembinaan Sumber Daya Manusia pengadaan barang dan jasa	Orang	577
36	4.01.000049	Dokumen hasil penataan kelembagaan pengadaan barang dan jasa	Dokumen	0
37	4.01.000050	Dokumen hasil pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa	Dokumen	4
38	4.01.000051	Laporan hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Laporan	48
39	4.01.000055	Laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah	Laporan	4
40	4.01.000142	Dokumen hasil fasilitasi kerja sama dalam negeri	Dokumen	350
41	4.01.000143	Dokumen hasil fasilitasi kerja sama luar negeri	Dokumen	4
42	4.01.000144	Laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama	Laporan	1

4.02 - SEKRETARIAT DPRD

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
1	4.02.000007	Dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Dokumen	1
2	4.02.000008	Dokumen hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah (Perda)	Dokumen	1
3	4.02.000009	Dokumen kajian perundang-undangan	Dokumen	0
4	4.02.000010	Dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang difasilitasi	Dokumen	2
5	4.02.000012	Orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan daerah yang dilakukan bersama oleh Dewan Perwakilan	Orang	0

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
		Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah		
6	4.02.000013	Dokumen hasil pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Dokumen	1
7	4.02.000014	Dokumen hasil pembahasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Dokumen	1
8	4.02.000015	Dokumen hasil pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Dokumen	12
9	4.02.000016	Dokumen hasil pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Dokumen	1
10	4.02.000018	Dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Dokumen	2
11	4.02.000019	Laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	Laporan	24
12	4.02.000020	Laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur	Laporan	24
13	4.02.000021	Laporan pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	Laporan	24
14	4.02.000022	Laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	Laporan	24
15	4.02.000025	Dokumen hasil pengawasan penggunaan anggaran	Dokumen	24
16	4.02.000026	Rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah	Dokumen	0
17	4.02.000028	Dokumen hasil pendalaman tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Dokumen	6
18	4.02.000029	Orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	Orang	30
19	4.02.000030	Tenaga ahli fraksi	Orang	9
20	4.02.000032	Dokumen rencana kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Dokumen	1

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
21	4.02.000033	Dokumen publikasi dan dokumentasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Dokumen	9
22	4.02.000034	Laporan hasil kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Laporan	12
23	4.02.000036	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	Dokumen	106
24	4.02.000038	Kode etik dan tata beracara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Dokumen	0
25	4.02.000039	Laporan hasil pengawasan kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Laporan	13
26	4.02.000040	Dokumen rekomendasi hasil fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi persetujuan kerja sama daerah	Dokumen	1
27	4.02.000041	Dokumen bahan komunikasi dan publikasi yang disusun	Dokumen	10
28	4.02.000042	Dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Dokumen	52
29	4.02.000043	Laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang disusun	Laporan	0
30	4.02.000044	Dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah	Dokumen	24
31	4.02.000045	Dokumen hasil fasilitasi tugas pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Dokumen	3
32	4.02.000046	Dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan tugas panitia khusus	Dokumen	5

5.01 – PERENCANAAN

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
1	5.01.000012	Dokumen hasil penerapan sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah	Dokumen	1
2	5.01.000013	Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)/Rencana	Dokumen	7

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
		Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD))		
3	5.01.000020	Dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi yang ditetapkan (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD))	Dokumen	5
4	5.01.000030	Laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	Laporan	8
5	5.01.000037	Laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Laporan	2

5.02 – KEUANGAN

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
1	5.02.000001	Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun	Dokumen	2
2	5.02.000002	Dokumen perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun	Dokumen	2
3	5.02.000003	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diverifikasi	Dokumen	753
4	5.02.000004	Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diverifikasi	Dokumen	753
5	5.02.000006	Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diverifikasi	Dokumen	753
6	5.02.000007	Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Dokumen	2

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
7	5.02.000008	Peraturan daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Dokumen	2
8	5.02.000009	Dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Dokumen	2
9	5.02.000010	Dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	Dokumen	2
10	5.02.000011	Dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	Dokumen	2
11	5.02.000012	Dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan	Dokumen	2
12	5.02.000014	Laporan hasil evaluasi rancangan Peraturan daerah tentang pajak dan retribusi kabupaten/kota	Laporan	0
13	5.02.000017	Laporan evaluasi rancangan Peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota	Laporan	1
14	5.02.000018	Dokumen yang mendapatkan layanan asistensi	Dokumen	0
15	5.02.000019	Laporan hasil sosialisasi regulasi bidang keuangan	Laporan	2
16	5.02.000020	Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang diasistensi	Lembaga	20
17	5.02.000023	Dokumen hasil konsultasi dan koordinasi pembinaan penyusunan dan evaluasi rancangan Peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran	Dokumen	1

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
		Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota		
18	5.02.000025	Dokumen hasil koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah konsolidasian provinsi dan kabupaten/kota dan statistik keuangan pemerintahan daerah	Dokumen	1
19	5.02.000026	Dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Dokumen	5
20	5.02.000027	Laporan hasil pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	Laporan	1
21	5.02.000028	Dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana (SPD)	Dokumen	12
22	5.02.000030	Dokumen hasil koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Dokumen	1
23	5.02.000031	Dokumen hasil koordinasi, pelaksanaan kerja sama dan pemantauan transaksi nontunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Dokumen	1
24	5.02.000032	Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan laporan hasil koordinasi dalam rangka penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan	Laporan	4

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
		dan penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
25	5.02.000034	Dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan instansi terkait	Dokumen	12
26	5.02.000035	Petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	Dokumen	2
27	5.02.000037	Laporan hasil koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	Laporan	1
28	5.02.000038	Dokumen hasil rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan Laporan Operasional (LO), dan beban	Dokumen	1
29	5.02.000039	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bulanan, triwulanan dan semesteran	Laporan	2
30	5.02.000040	Laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan laporan keuangan pemerintah daerah yang terkonsolidasi	Laporan	43
31	5.02.000041	Rancangan Peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi	Dokumen	1

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
32	5.02.000042	Dokumen tanggapan/tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Dokumen	1
33	5.02.000043	Dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Dokumen	2
34	5.02.000044	Dokumen hasil analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Dokumen	1
35	5.02.000046	Sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah	Dokumen	1
36	5.02.000047	Orang yang mengikuti pembinaan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pemerintah provinsi	Orang	138
37	5.02.000048	Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) provinsi yang dibina	Lembaga	113
38	5.02.000052	Laporan hasil analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah	Laporan	16
39	5.02.000056	Laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Laporan	2
40	5.02.000057	Laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	Laporan	1
41	5.02.000060	Dokumen hasil implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	Dokumen	1
42	5.02.000062	Standar harga yang disusun	Dokumen	2
43	5.02.000063	Standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah	Dokumen	0

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
44	5.02.000064	Rencana kebutuhan barang milik daerah	Dokumen	2
45	5.02.000065	Kebijakan pengelolaan barang milik daerah	Dokumen	8
46	5.02.000066	Laporan penatausahaan barang milik daerah	Laporan	2
47	5.02.000067	Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) barang milik daerah	Laporan	4
48	5.02.000068	Laporan hasil pengamanan barang milik daerah	Laporan	21
49	5.02.000069	Laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah	Laporan	2
50	5.02.000070	Laporan hasil pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah	Laporan	3
51	5.02.000071	Dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	Dokumen	5
52	5.02.000072	Laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Laporan	15
53	5.02.000073	Laporan barang milik daerah yang disusun	Laporan	0
54	5.02.000074	Orang yang mengikuti pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota	Orang	1.000
55	5.02.000075	Dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	Dokumen	1
56	5.02.000076	Laporan pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	Laporan	2
57	5.02.000077	Laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Laporan	4
58	5.02.000078	Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Unit	1
59	5.02.000079	Laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak, dan wajib pajak daerah	Laporan	4

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
60	5.02.000080	Laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Laporan	4
61	5.02.000081	Dokumen ketetapan pajak daerah	Dokumen	2.398.200
62	5.02.000082	Laporan permasalahan yang telah ditindaklanjuti dan belum ditindaklanjuti	Laporan	4
63	5.02.000083	Dokumen yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Dokumen	0
64	5.02.000084	Dokumen tertagihnya wajib pajak (WP) yang memiliki piutang pajak	Dokumen SSPD	1.943.717
65	5.02.000085	Dokumen keberatan yang telah ditindaklanjuti	Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	0
66	5.02.000086	Laporan hasil pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Laporan	4
67	5.02.000087	Laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Laporan	1
68	5.02.000088	Laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	Laporan	6
69	5.02.000093	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diverifikasi	Dokumen	753
70	5.02.000117	Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota	Dokumen	1
71	5.02.000125	Laporan statistik keuangan pemerintahan daerah pada pemerintah kabupaten/kota	Laporan	1
72	5.02.000153	Dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	Dokumen	0

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
73	5.02.000156	Laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak, dan wajib pajak daerah	Laporan	4
74	5.02.000158	Objek pajak dengan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)	Objek Pajak	1.695.949
75	5.02.000160	Layanan dan konsultasi pajak daerah	Layanan	2
76	5.02.000161	Data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	Dokumen	0
77	5.02.000162	Dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	Dokumen	4
78	5.02.000163	Dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	Dokumen	0
79	5.02.000164	Dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Dokumen	4

5.03 – KEPEGAWAIAN

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
1	5.03.000003	Dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	Dokumen	4
2	5.03.000006	Dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Dokumen	4
3	5.03.000008	Lembaga profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang difasilitasi	Lembaga	2
4	5.03.000010	Dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Dokumen	4
5	5.03.000011	Dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	Dokumen	4
6	5.03.000013	Dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana, dan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) antardaerah	Dokumen	4
7	5.03.000014	Pengelolaan kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara (ASN)	Laporan	4

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
8	5.03.000017	Dokumen pengelolaan *assessment center*	Dokumen	5
9	5.03.000029	Dokumen hasil fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional	Dokumen	912
10	5.03.000031	Dokumen hasil penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Dokumen	4
11	5.03.000034	Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberikan penghargaan	Orang	1.547
12	5.03.000037	Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	Orang	430
13	5.03.000038	Laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)	Laporan	4
14	5.03.000040	Laporan hasil evaluasi disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)	Laporan	4
15	5.03.000059	Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapatkan pendidikan lanjutan	Orang	110
16	5.03.000068	Aparatur Sipil Negara (ASN) fungsional yang dibina	Orang	654
17	5.03.000069	Aparatur Sipil Negara (ASN) jabatan fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir	Orang	912
18	5.03.000070	Dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN)	Dokumen	4

5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
1	5.04.000001	Kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum yang disusun	Dokumen	2

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
2	5.04.000002	Standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum yang disusun	Dokumen	1
3	5.04.000003	Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti pengembangan kompetensi	Orang	3.480
4	5.04.000004	Dokumen hasil pembinaan, pengoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi	Dokumen	3
5	5.04.000005	Kebijakan teknis dan rencana sertifikasi kompetensi, pengelolaan kelembagaan, dan pengembangan kompetensi	Dokumen	1
6	5.04.000006	Dokumen lembaga sertifikasi	Dokumen	1
7	5.04.000007	Aparatur Sipil Negara (ASN) provinsi dan kabupaten/kota yang tersertifikasi	Orang	542
8	5.04.000008	Laporan pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, dan sumber belajar	Laporan	1
9	5.04.000011	Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan	Orang	1.351

5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
1	5.05.000064	Publikasi ilmiah	Naskah	15
2	5.05.000065	Pemangku kebijakan riset dan inovasi	Lembaga	3
3	5.05.000069	Naskah kebijakan	Dokumen	2
4	5.05.000075	Sosialisasi dan diseminasi	Dokumen	2

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
5	5.05.000076	Lokakarya, pameran, dan promosi	Berita Acara	2
6	5.05.000077	Apresiasi riset dan inovasi	Berita Acara	1
7	5.05.000078	Perusahaan rintisan	Unit	1
8	5.05.000081	Klaster industri berbasis unggulan daerah	Unit	0
9	5.05.000083	Riset dan seminar internasional	Berita Acara	2
10	5.05.000087	Perangkat lunak	Aplikasi	2

6.01 - INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
1	6.01.000001	Laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	14
2	6.01.000002	Laporan hasil pengawasan keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	23
3	6.01.000003	Laporan hasil reviu laporan kinerja	Laporan	1
4	6.01.000004	Laporan hasil reviu laporan keuangan	Laporan	1
5	6.01.000005	Laporan hasil pengawasan umum dan teknis kabupaten/kota	Laporan	69
6	6.01.000006	Kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	Kesepakatan	5
7	6.01.000007	Dokumen hasil pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Dokumen	4
8	6.01.000008	Laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	Laporan	1
9	6.01.000009	Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Laporan	38
10	6.01.000010	Rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	Rekomendasi	38
11	6.01.000011	Rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	Rekomendasi	38

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
12	6.01.000012	Perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Perangkat Daerah	118
13	6.01.000013	Perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	Perangkat Daerah	0
14	6.01.000014	Kegiatan koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Kegiatan	65
15	6.01.000015	Perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	Perangkat Daerah	0
16	6.01.000020	Laporan hasil pengawasan desa	Laporan	0

7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
1	7.01.000007	Orang yang mengikuti peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan penanganan kebersihan lingkungan	Kelompok Masyarakat	18.880
2	7.01.000009	Laporan program kewaspadaan dini masyarakat tingkat kelurahan yang disediakan	Laporan	2.517
3	7.01.000010	Lembaga yang mengikuti peningkatan peran kelembagaan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) tingkat kelurahan	Lembaga	23.540
4	7.01.000011	Laporan hasil kegiatan keagamaan tingkat kelurahan	Laporan	508
5	7.01.000012	Laporan penanganan bencana tingkat kelurahan	Laporan	172
6	7.01.000014	Laporan penyelenggaraan posko bersama pemilihan umum tingkat kelurahan	Laporan	2
7	7.01.000019	Dokumen hasil penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan petugas kapal dinas	Dokumen	108

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
8	7.01.000020	Laporan program kewaspadaan dini masyarakat tingkat kecamatan yang disediakan	Laporan	420
9	7.01.000021	Laporan hasil kegiatan keagamaan tingkat kecamatan	Laporan	104
10	7.01.000023	Laporan penyelenggaraan posko bersama pemilihan umum tingkat kecamatan	Laporan	0
11	7.01.000028	Laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Laporan	198
12	7.01.000037	Laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	Laporan	1.920
13	7.01.000043	Kelompok masyarakat (pokmas) dan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Pokmas/Ormas	24.409
14	7.01.000045	Lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	280
15	7.01.000071	Laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Laporan	770

7.02 - KOTA ADMINISTRASI

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
1	7.02.000005	Lembaga kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya	Lembaga	3.492
2	7.02.000006	Dokumen pengurusan perkara di pengadilan tingkat kota administrasi	Dokumen	17
3	7.02.000007	Dokumen penyelesaian sengketa pertanahan tingkat kota administrasi	Dokumen	24
4	7.02.000008	Dokumen kegiatan peningkatan kesadaran hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) tingkat kota administrasi	Dokumen	23

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
5	7.02.000009	Dokumen hasil peningkatan dan pembinaan kota peduli Hak Asasi Manusia (HAM) kota administrasi	Dokumen	2
6	7.02.000010	Laporan dan evaluasi kinerja walikota kota administrasi yang disusun	Laporan	20
7	7.02.000011	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kota administrasi yang disusun	Laporan	5
8	7.02.000012	Dokumen koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembentukan kewirausahaan baru pada kota administrasi	Dokumen	20
9	7.02.000013	Dokumen hasil kegiatan keprotokolan kota administrasi	Dokumen	24
10	7.02.000014	Dokumen penyelenggaraan tamu dan jamuan resmi kota administrasi	Dokumen	24
11	7.02.000015	Dokumen koordinasi, pemantauan dan evaluasi kota sehat di kota administrasi	Dokumen	10
12	7.02.000016	Dokumen koordinasi, pemantauan dan pengendalian dan evaluasi penanggulangan kemiskinan di kota administrasi	Dokumen	12
13	7.02.000017	Dokumen koordinasi, pemantauan dan evaluasi kota layak anak di kota administrasi	Dokumen	10
14	7.02.000018	Dokumen koordinasi, pemantauan dan evaluasi Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di kota administrasi	Dokumen	12
15	7.02.000019	Dokumen pelaksanaan partisipasi kota administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	Dokumen	6
16	7.02.000020	Dokumen pembinaan dan evaluasi kecamatan dan kelurahan kota administrasi	Dokumen	6
17	7.02.000022	Dokumen Rapat Pimpinan (Rapim) dan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) kota administrasi	Dokumen	20
18	7.02.000024	Dokumen hasil *monitoring* dan evaluasi	Dokumen	4

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
		kegiatan/pembangunan/rehab total/rehab sedang kantor lurah kota administrasi		
19	7.02.000026	Dokumen koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembangunan dan pemanfaatan ruang bangunan	Dokumen	20
20	7.02.000028	Dokumen standar operasional dan prosedur kota administrasi yang disusun dan dievaluasi	Dokumen	8
21	7.02.000029	Dokumen pengendalian dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat tingkat kota administrasi	Dokumen	20
22	7.02.000030	Dokumen pengendalian dan evaluasi pelayanan publik tingkat kota administrasi	Dokumen	14
23	7.02.000031	Dokumen koordinasi pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kota administrasi yang dilaksanakan	Dokumen	12
24	7.02.000032	Dokumen pembinaan administrasi kepegawaian kota administrasi	Dokumen	24
25	7.02.000040	Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kota administrasi yang disusun	Dokumen	16
26	7.02.000041	Dokumen penatausahaan keuangan tingkat kota administrasi	Dokumen	20
27	7.02.000042	Dokumen koordinasi bidang perbendaharaan kota administrasi	Dokumen	24
28	7.02.000043	Dokumen peningkatan tugas dan fungsi dewan kota administrasi	Dokumen	72
29	7.02.000044	Laporan hasil kegiatan keagamaan tingkat kota administrasi	Laporan	10
30	7.02.000046	Dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan anggaran kota administrasi	Dokumen	24
31	7.02.000048	Dokumen penagihan kewajiban fasilitas sosial (fasos), fasilitas umum (fasum), dan sinkronisasi data Surat Izin Penunjukan Penggunaan	Dokumen	20

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
		Tanah (SIPPT) kota administrasi		
32	7.02.000049	Dokumen koordinasi, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kegiatan di bawah koordinasi asisten perekonomian dan pembangunan kota administrasi	Dokumen	20
33	7.02.000050	Dokumen koordinasi, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kegiatan di bawah koordinasi asisten administrasi dan kesejahteraan rakyat kota administrasi	Dokumen	20

7.03 - KABUPATEN ADMINISTRASI

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
1	7.03.000001	Dokumen Forum Koordinasi Pimpinan Kabupaten (Forkopimkab)	Dokumen	2
2	7.03.000002	Laporan tatap muka bupati beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dengan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Dewan Kabupaten (DEKAB), Tokoh Masyarakat (TOMAS) dan lembaga masyarakat lainnya	Laporan	0
3	7.03.000003	Dokumen partisipasi kabupaten administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)	Dokumen	1
4	7.03.000004	Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) kabupaten yang disusun dan dievaluasi	Dokumen	1
5	7.03.000005	Dokumen hasil pelaksanaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) tingkat kabupaten yang ditingkatkan	Dokumen	12

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
6	7.03.000006	Dokumen Rapat Pimpinan (Rapim) dan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) kabupaten administrasi	Dokumen	4
7	7.03.000007	Orang yang mengikuti peningkatan wawasan bagi anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), dan Dewan Kabupaten (Dekab)	Orang	172
8	7.03.000008	Dokumen koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penataan kawasan di kabupaten administrasi	Dokumen	4
9	7.03.000009	Dokumen penagihan kewajiban fasilitas sosial (fasos), fasilitas umum (fasum), dan sinkronisasi data Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) kabupaten administrasi	Dokumen	4
10	7.03.000010	Dokumen partisipasi kabupaten administrasi kepulauan seribu pada pameran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)	Dokumen	1
11	7.03.000011	Laporan hasil pemantauan Aksi Kebersihan Minggu Pagi (AKMP) dan Silaturahmi Minggu Pagi (SMP) kabupaten administrasi	Laporan	12
12	7.03.000012	Orang yang mengikuti peningkatan kesadaran hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) tingkat kabupaten	Orang	400
13	7.03.000013	Dokumen peningkatan dan pembinaan kota peduli Hak Asasi Manusia (HAM)	Dokumen	1
14	7.03.000014	Dokumen pengurusan perkara di pengadilan tingkat kabupaten	Dokumen	4
15	7.03.000015	Dokumen pengendalian dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat tingkat kabupaten administrasi	Dokumen	4
16	7.03.000016	Dokumen pelaksanaan pekan olahraga dan seni	Dokumen	0

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
		budaya bagi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)		
17	7.03.000017	Pegawai kabupaten administrasi yang mengikuti *character building*	Orang	8
18	7.03.000018	Laporan penyelenggaraan aktualisasi nilai keagamaan bagi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) kabupaten administrasi	Laporan	4
19	7.03.000019	Dokumen Pekan Olahraga, Seni, dan Budaya (Porsenibud) anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) kabupaten administrasi	Dokumen	0
20	7.03.000020	Dokumen pembekalan pegawai yang akan memasuki batas usia pensiun di lingkungan kabupaten administrasi	Dokumen	0
21	7.03.000021	Lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga	175
22	7.03.000022	Dokumen pembinaan dan evaluasi kecamatan dan kelurahan	Dokumen	2
23	7.03.000023	Dokumen pembinaan dan pendampingan wirausaha	Dokumen	0
24	7.03.000024	Dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kota layak anak di kota/kabupaten	Dokumen	2
25	7.03.000025	Dokumen pembinaan dan pemantauan pelaksanaan perluasan kerja, penyaluran, dan penempatan tenaga kerja	Dokumen	1
26	7.03.000026	Dokumen pembinaan hubungan industrial, syarat kerja, dan kesejahteraan pekerja	Dokumen	0
27	7.03.000027	Dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kota sehat di kabupaten	Dokumen	2
28	7.03.000028	Dokumen rencana penataan sarana dan prasarana Pedagang Kaki Lima (PKL)	Dokumen	0

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
29	7.03.000029	Dokumen koordinasi, pemantauan dan evaluasi bidang sumber daya air, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, cipta karya, tata ruang, dan pertanahan di kabupaten administrasi	Dokumen	4
30	7.03.000030	Dokumen koordinasi, pemantauan dan evaluasi bidang perindustrian dan energi, pariwisata dan kebudayaan, perhubungan tingkat kabupaten administrasi	Dokumen	0
31	7.03.000031	Dokumen koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembentukan kewirausahaan baru pada kabupaten administrasi	Dokumen	4
32	7.03.000032	Dokumen koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembangunan dan pemanfaatan ruang bangunan kabupaten administrasi	Dokumen	4
33	7.03.000033	Dokumen koordinasi, pemantauan dan evaluasi bidang ketahanan pangan, kelautan dan pertanian serta lingkungan hidup dan kebersihan di kabupaten administrasi	Dokumen	0
34	7.03.000034	Laporan hasil pelantikan gugus depan tingkat kwarcab kabupaten administrasi	Laporan	1
35	7.03.000035	Dokumen koordinasi, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kegiatan di bawah koordinasi asisten perekonomian dan pembangunan kabupaten	Dokumen	4
36	7.03.000036	Dokumen hasil dialog interaktif pencegahan, peredaran, penanggulangan, dan penyalahgunaan narkotika tingkat kabupaten administrasi	Dokumen	4
37	7.03.000037	Dokumen koordinasi, pemantauan, dan evaluasi bidang kesehatan, pemberdayaan,	Dokumen	4

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
		perlindungan anak, dan pengendalian penduduk		
38	7.03.000038	Dokumen koordinasi, pemantauan dan evaluasi bidang pendidikan, olahraga dan pemuda, serta perpustakaan dan arsip	Dokumen	15
39	7.03.000039	Laporan hasil kegiatan keagamaan tingkat kabupaten administrasi	Laporan	2
40	7.03.000040	Dokumen pelaksanaan pelatihan keterampilan dan ketenagakerjaan	Dokumen	5
41	7.03.000041	Laporan akomodasi pengiriman peserta pelatihan ke pusat pelatihan kerja daerah	Laporan	7

8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
1	8.01.000001	Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka)	Orang	294
2	8.01.000002	Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka)	Orang	1.757
3	8.01.000003	Diskusi pembinaan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Kegiatan	4
4	8.01.000004	Kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purna-Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Purnapaskibraka)	Kegiatan	8
5	8.01.000005	Kelengkapan kegiatan pembinaan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Unit	108
6	8.01.000006	Kelengkapan pada pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka)	Orang	177
7	8.01.000007	Kelengkapan pada pembinaan lanjutan kepada purna-Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Purnapaskibraka) Duta Pancasila	Unit	12
8	8.01.000008	Kelengkapan pelaksanaan pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka)	Unit	513
9	8.01.000009	Kelengkapan pelaksanaan tugas Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka)	Unit	294

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
10	8.01.000010	Kelengkapan pelaksanaan tugas purna-Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Purnapaskibraka) Duta Pancasila	Unit	294
11	8.01.000011	Kelengkapan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purna-Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Purnapaskibraka)	Unit	23
12	8.01.000012	Kelengkapan pembinaan lanjutan kepada purna-Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Purnapaskibraka) Duta Pancasila	Unit	23
13	8.01.000013	Kelengkapan pengangkatan purna-Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Purnapaskibraka) Duta Pancasila	Unit	88
14	8.01.000014	Narasumber atau fasilitator kegiatan pembinaan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Orang	15
15	8.01.000015	Narasumber atau fasilitator pada pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka)	Orang	46
16	8.01.000016	Narasumber atau pelatih dalam pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka)	Orang	32
17	8.01.000017	Pamong/pengasuh	Orang	20
18	8.01.000018	Panitia rekrutmen dan seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka)	Orang	69
19	8.01.000019	Pelatih Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka)	Orang	32
20	8.01.000020	Peningkatan kompetensi bidang karakter purna-Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Purnapaskibraka) Duta Pancasila	Kegiatan	2
21	8.01.000021	Peningkatan kompetensi kecerdasan estetika (olah rasa) purna-Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Purnapaskibraka) Duta Pancasila	Kegiatan	0
22	8.01.000022	Peningkatan kompetensi kecerdasan kinestetik/olahraga purna-Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Purnapaskibraka) Duta Pancasila	Kegiatan	0

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
23	8.01.000023	Peningkatan kompetensi kepemimpinan Pancasila purna-Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Purnapaskibraka) Duta Pancasila	Kegiatan	1
24	8.01.000024	Peningkatan kompetensi literasi dan komunikasi purna-Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Purnapaskibraka) Duta Pancasila	Kegiatan	0
25	8.01.000025	Peserta calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka)	Orang	2.222
26	8.01.000026	Peserta kegiatan diskusi pembinaan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Orang	294
27	8.01.000027	Peserta kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purna-Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Purnapaskibraka)	Orang	294
28	8.01.000028	Peserta kegiatan pembinaan lanjutan kepada purna-Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Purnapaskibraka) Duta Pancasila	Orang	294
29	8.01.000029	Peserta kegiatan seminar pembinaan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Orang	1.920
30	8.01.000030	Peserta seminar pembinaan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Orang	1.920
31	8.01.000031	purna-Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Purnapaskibraka)	Orang	44
32	8.01.000032	purna-Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Purnapaskibraka) Duta Pancasila	Orang	74
33	8.01.000033	Seminar pembinaan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Kegiatan	19
34	8.01.000034	Tim panitia rekrutmen dan seleksi	Orang	74
35	8.01.000035	Tim pendukung pelaksanaan tugas Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka)	Orang	94
36	8.01.000036	*Training of trainer* kepamongan	Kegiatan	0
37	8.01.000037	Transportasi dalam pembentukan Pasukan	Unit	5

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
		Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka)		
38	8.01.000038	Transportasi pada pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka)	Unit	5
39	8.01.000039	Transportasi pelaksanaan tugas Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Páskibraka)	Unit	5
40	8.01.000041	Orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan sejarah kebangsaan	Orang	4.840
41	8.01.000042	Orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan sejarah kebangsaan	Orang	900
42	8.01.000043	Laporan hasil pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan sejarah kebangsaan	Laporan	0
43	8.01.000044	Dokumen hasil pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	Dokumen	1
44	8.01.000045	Purna-Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Purnapaskibraka) Duta Pancasila	Orang	44
45	8.01.000046	Laporan hasil pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan laporan hasil pembinaan purna-Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Purnapaskibraka)	Dokumen	7
46	8.01.000047	Dokumen pelaksanaan tugas Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka)	Dokumen	8

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
47	8.01.000048	Laporan hasil pelaksanaan tugas purna-Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Purnapaskibraka) Duta Pancasila	Dokumen	8
48	8.01.000049	Laporan hasil pembinaan lanjutan kepada purna-Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Purnapaskibraka) Duta Pancasila	Dokumen	2
49	8.01.000050	Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka)	Orang	44
50	8.01.000051	Dokumen program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah yang disusun	Dokumen	1
51	8.01.000053	Orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Orang	4.028
52	8.01.000054	Orang yang mengikuti koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Orang	593
53	8.01.000055	Laporan hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum	Laporan	0

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
		kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah		
54	8.01.000059	Peserta koordinasi di bidang pendaftaran organisasi kemasyarakatan (ormas), pemberdayaan organisasi kemasyarakatan (ormas), evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan (ormas), serta pengawasan organisasi kemasyarakatan (ormas) maupun organisasi kemasyarakatan (ormas) asing di daerah.	Orang	3.100
55	8.01.000061	Dokumen program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang disusun	Dokumen	2
56	8.01.000063	Orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Orang	6.492
57	8.01.000064	Orang yang mengikuti koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Orang	995
58	8.01.000065	Laporan hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama, dan penghayat kepercayaan di daerah	Laporan	12
59	8.01.000066	Dokumen program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan	Dokumen	1

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
		lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antarnegara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah yang disusun		
60	8.01.000067	Kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antarnegara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah yang disusun	Dokumen	1
61	8.01.000068	Orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antarnegara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Orang	5.202
62	8.01.000069	Orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antarnegara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Orang	1.799
63	8.01.000070	Laporan hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antarnegara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Laporan	93
64	8.01.000071	Dokumen hasil pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah provinsi	Dokumen	10

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
65	8.01.000072	Dokumen program kerja di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan sejarah kebangsaan yang disusun	Dokumen	24
66	8.01.000075	Orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan sejarah kebangsaan	Orang	900
67	8.01.000088	Laporan kegiatan pelaksanaan tugas Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka)	Kegiatan	8
68	8.01.000089	Dokumen program kerja di bidang pendaftaran organisasi kemasyarakatan (ormas), pemberdayaan organisasi kemasyarakatan (ormas), evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan (ormas), serta pengawasan organisasi kemasyarakatan (ormas), maupun organisasi kemasyarakatan (ormas) asing di daerah.	Dokumen	1
69	8.01.000091	Orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran organisasi kemasyarakatan (ormas), pemberdayaan organisasi kemasyarakatan (ormas), evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan (ormas), serta pengawasan organisasi kemasyarakatan (ormas), maupun organisasi kemasyarakatan (ormas) asing di daerah.	Orang	2.195
70	8.01.000093	Laporan hasil *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran organisasi kemasyarakatan (ormas), pemberdayaan organisasi kemasyarakatan (ormas), evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan (ormas), serta pengawasan organisasi kemasyarakatan (ormas),	Laporan	12

No	Kode DSSD	Uraian Indikator	Satuan	Data 2025
		maupun organisasi kemasyarakatan (ormas) asing di daerah.		
71	8.01.000094	Dokumen program kerja di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan sejarah kebangsaan yang disusun	Dokumen	24
72	8.01.000104	Dokumen hasil pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota	Dokumen	10

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG